

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
SYATIBI (STUDI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)**



TESIS

MUHAMMAD NASRULLOH

(19780044)

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
SYATIBI (STUDI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasajana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan program magister

Al-Akhwāl As-Syakhshīyyah

MUHAMMAD NASRULLOH

(19780044)

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

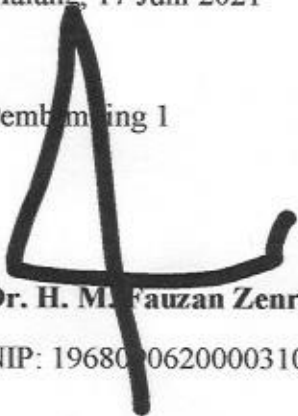
Tesis dengan judul:

ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
SYATIBI (STUDI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 17 Juni 2021

Pembimbing 1



Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

NIP: 196800062000031001

Pembimbing 2



Cecep Lukman Yasin M.A., Ph.D.

NIP: 197312141998031001

Kaprodi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP: 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **“Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)”** yang diajukan oleh Muhammad Nasrulloh NIM 19780044 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 26 Agustus 2021 dan telah dinyatakan lulus.

Dewan Penguji:

1. Dr. Badruddin M.HI

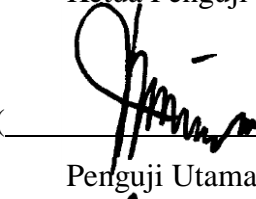
NIP. 196411272000031001



Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag

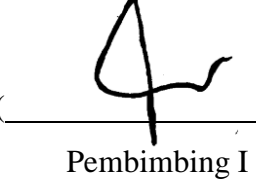
NIP. 197108261998032002



Penguji Utama

3. Dr. H. M. Fauzan Zenrif M.Ag

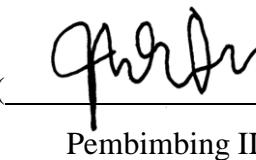
NIP. 196809062000031001



Pembimbing I

4. Raden Cecep Lukman Yasin MA., Ph.D

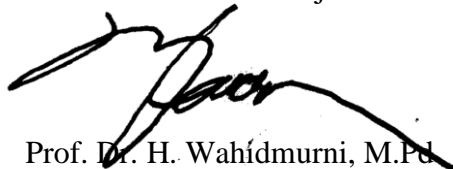
NIP. 197312141998031001



Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nasrulloh

NIM : 19780044

Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah

Judul Tesis : ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PERSEPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH SYATIBI (STUDI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Demi Allah, Menyatakan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2021

Penulis,



Muhammad Nasrulloh

NIM 19780044

MOTTO

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رواه ابن ماجه، والترمذي

Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah Saw bersabda, Ketika datang kepada kalian seseorang yang melegakan kalian etika dan agamanya, maka nikahkalan (putri) kalian dengannya. Jika tidak, niscaya akan terjadi musibah dan kerusakan hebat di muka bumi. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Persembahan

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis tercinta H. Abid Muhaimin dan Hj. Nurus Sa'adah yang telah memberikan dan mengusahakan segala-galanya kepada anaknya demi mendapatkan yang terbaik. Semoga Allah Swt memberi balasan yang tak terhingga kepada beliau berdua.

Kata Pengantar

Segala puji syukur tercurahkan kehadiran Allah Swt tuhan semesta alam atas segala nikmat, taufiq dan inayahnya sehingga tesis dengan judul: Isbat Nikah Poligami Siri Persepektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018) bisa terselesaikan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu diharapkan syafaatnya kelak di akhirat.

Tesis ini merupakan tugas akhir pribadi dalam menempuh jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Al-Akhwat As-Syakhshiyah. Selama proses pembelajaran sekaligus pengerjaan dan penyelesaian tesis, pribadi banyak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu Penulis bermaksud menyebutkan secara rinci dengan maksud penghormatan dan penghargaan kepada beliau-beliau diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag dan Prof. Dr. Zainuddin M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran wakil rektor
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag dan Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala fasilitas dan layanan yang diberikan selama kami menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi M.A dan Dr. H. Fadil M.Ag selaku ketua prodi Program Studi Al-Akhwat As-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala bimbingan, petunjuk dan masukan yang diberikan.
4. Dr. M. Fauzan Zenrif M.Ag selaku pembimbing 1 yang selalu memberi masukan, motivasi dan bimbingan kepada penulis agar menjadi pribadi yang profesional dalam mengerjakan tesis.

5. Cecep Lukman Yasin M.A P.hD selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis guna menyempurnakan tesis yang dikerjakan.
6. Segenap jajaran dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan wejangannya kepada penulis selama menempuh pembelajaran.
7. Kedua orang tua yang selalu penulis cintai H. Abid Muhaimin dan Hj. Nurus Sa'adah dimana letak semangat dan kunci kesuksesan penulis bersandar pada rida mereka berdua. Semoga Allah Swt membelas kebaikan beliau dengan sebaik-baiknya belasan. Tak lupa kepada saudara-saudara penulis Hj. Hulailiyatun Ni'mah beserta suami H. Rofi'uddin, Muhammad Atho'ullah beserta istri Lailataul Maghfiroh, Nuriyatul Isma Mufidah beserta keponakan Izzun Niam, Muhammad Kavin al-Baroki dan Adrian Zayyan Amzari
8. Keluarga besar KH. Zubair Hamzah S.Ag, M.Pd beserta istri Hj. Rif'ah Hisbiyah S.Ag. M.Pd.I, Mubarroh dan Nur Indah Qurrota A'yun yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pembelajaran.
9. Teman-teman kelas AS B angkatan semester ganjil 2019 yang menemani masa-masa pembelajaran dengan saling memotivasi, membantu dan mendoakan satu sama lain.
10. Dzurriyah KH. Abdul Karim Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang telah menempa penulis zahir batin beserta segenap guru-guru penulis di Madrasah Hidayul Muftadi'in Lirboyo.
11. Dr. KH. Ahmad Muzakki M.A selaku mudir Ma'had al-Jami'ah al-Aly beserta segenap pengasuh dan keluarga besar MSAA yang telah memberikan motivasi dan pengalaman berharga selama hidup di lingkungan Ma'had.

12. Segenap mahasantri Ma'had Al-Jamiah Al-Aly yang senantiasa penulis harapkan menjadi santri hebat, teladan dan berkemajuan, dimana penulis banyak menimba pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah terbayarkan dengan apapun.

Semoga Allah Swt memberkahi, merahmati dan menolong beliau-beliau yang disebutkan di atas. Pribadi penulis menyadari bahwa apa yang ditulis ini jauh dari kesempurnaan. Kendati demikian penulis berusaha semaksimal mungkin menganalisis, menelaah dan mengkaji tesis. Karena itu besar harapan penulis, kandungan tesis ini tidak berhenti, namun tetap terbuka menerima koreksi dari siapapun demi kesempurnaan kandungan tesis agar menjadi lebih baik.

Malang 17 Juni 2021

Muhammad Nasrulloh
NIM: 19780044

ABSTRAK

Muhammad Nasrulloh 2021, *Isbat Nikah Poligami Siri Persepektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018)*, Tesis, Program Studi Al-Akhwāl As-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. M. Fauzan Zenrif M.Ag (2) Cecep Lukman Yasin M.A P.hD.

Kata kunci: Isbat nikah, poligami siri, masalah mursalah

Terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang isinya menutup pintu isbat nikah poligami siri di satu sisi bermuatan positif, namun di sisi lain juga bermuatan negatif. Konsekuensi logis peraturan tersebut adalah pasangan poligami tidak bisa mengesahkan pernikahan mereka. Hal ini berisiko terhadap perempuan yang dipoligami, karena dapat menimbulkan dampak negatif menyangkut hak-haknya. Kajian menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai rujukan sebab penutupan isbat nikah mengandung dampak masalah dan madlarat. Oleh karena itu Pertanyaan besarnya adalah apakah yang masalah adalah tetap membuka pintu isbat nikah atau sebaliknya. Sekaligus mengurai bagaimana dampak Sema terhadap hak-hak perempuan

Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau normatif yang pisau analisisnya menggunakan pendekatan masalah mursalah Syatibi. Oleh karena itu rujukan sumber datanya menggunakan kitab-kitab karya Syatibi seperti al-I'tishām, Muwafakat dan referensi pendukung lainnya. Objek analisis adalah larangan isbat nikah poligami yang termaktub dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018. Telaah yang dilakukan adalah menilai dari sudut masalah, apakah penutupan itu sudah selaras dengan unsur-unsur masalah mursalah ataupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kajian masalah bahwa pelarangan isbat nikah poligami siri dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 perlu kaji kembali. Sebab yang masalah justru bukan menutup pintu isbat namun tetap membukanya. Hal ini karena dengan menutup pintu isbat poligami, berdampak atas madlarat yang ditanggung oleh perempuan meliputi hak-haknya sebagai istri atau warga Negara. Masalah penutupan SEMA hanya bersifat asumptif sedang masalah membukanya jelas nyata. Di sisi lain tidak lantas dengan dibukanya isbat nikah, hakim dengan mudah bisa mengesahkan poligami siri. Untuk itu jalan tengahnya adalah membuka pintu isbat secara totalitas atau tetap menerima perkara isbat poligami siri namun dengan alasan yang kuat. Apabila alasan tidak kuat, hakim bisa menjatuhkan putusan NO.

Abstract

Muhammad Nasrulloh 2021, Isbat Nikah Polygamy Series Persepektif Maslahah Mursalah Syatibi (Sema Study No. 3 year 2018), Thesis, Al-Akhwal As-Syakhshiyyah Study Program Postgraduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (1) Dr. M. Fauzan Zenrif M.Ag (2) Cecep Lukman Yasin M.A P.hD.

Keywords: Isbat nikah, polygamy siri, maslahah mursalah

The issuance of SEMA No. 3 of 2018 which contains closing the door to polygamous marriage isbat siri on one side is positively charged, but on the other hand negatively charged. The logical consequence of the rule is that polygamous couples cannot legalize their marriage. This is risky for women who are polygamous because it can result in negative excesses concerning their rights. Glasses maslahat mursalah become a reference because the closure of marriage isbat contains the impact of maslahat and madlarat. Therefore it is important to be studied to measure whether the maslahat is to keep the door open isbat nikah or vice versa.

This research is a literature study that uses a methodology-based approach in the form of Syatibi mursalah maslahat. Therefore the reference of the source of the law uses the books of Syatibi such as al-Itisham, Muwafakat and other supporting references. The analysis process is based on the study of syatibi maslahat by comparing the prohibition of polygamous marriage certificate series based on SEMA No. 3 of 2018.

The results of this study concluded that based on the standardization of maslahat that the prohibition of polygamous marriage certificate series in SEMA No. 3 of 2018 needs to be reviewed. The reason that maslahat is not closing the door isbat but still open it. Because by closing the door to polygamy, the impact on madlarat borne by women includes their rights as wives or citizens. Sema closure maslahat is only asumtif while maslahat open it is clearly real. On the other hand, not necessarily with the opening of marriage certificate, the judge can easily legalize polygamy siri. Therefore, the middle way is to open the door of isbat in totality or still accept the case of polygamous siri but with strong reasons. If the reason is not strong, the judge can drop the verdict NO.

ملخص البحث

محمد نصر الله ٢٠٢١، اثبات تعدد الزوجات بدون تسجيل عند نظرية المصلحة المرسلة للشاطبي (دراسة SEMA رقم ٣ سنة ٢٠١٨)، أطروحة، برنامج الدراسات العليا في ولاية الأخوال الشخصية، الجامعة الإسلامية للدولة مولانا مالك إبراهيم ملانج. أُمشرف (١) الدكتور محمد فوزان زينريف الماجستير (٢) سيسيبي لوكمان ياسين الماجستير

إصدار SEMA نمرة من ٢٠١٨ الذي يحتوي على إغلاق باب اثبات زواج تعدد الزوجات على جانب واحد مشحون بشكل إيجابي ، ولكن من ناحية أخرى مشحونة سلبا. والنتيجة المنطقية لقاعدة الزواج هي أن الأزواج المتعدي الزوجات لا يستطيعون إضفاء الشرعية على زواجهم. وهذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للنساء اللاتي تعدد الزوجات لأنه يمكن أن يؤدي إلى تجاوزات سلبية فيما يتعلق بحقوقهن. نظارات مسلات مرسلة تصبح مرجعا لأن إغلاق الزواج شابات يحتوي على تأثير مسلات ومادارات. لذلك من المهم أن تدرس لقياس ما إذا كان المصلحة هو الحفاظ على باب اثبات الزواج تعدد الزوجات مفتوحا أو بالعكس.

هذا البحث هو دراسة أدبية تستخدم نهجا قائما على المنهجية في شكل مصلات السيدة السطبية. ولذلك فإن الإشارة إلى مصدر القانون تستخدم كتب الساتبي مثل اللتيشام والموافقات وغيرها من المراجع الداعمة. وتستند عملية التحليل إلى دراسة مصلات السطبي من خلال مقارنة حظر سلسلة شهادات تعدد الزوجات على أساس SEMA رقم ٣ لعام ٢٠١٨.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أنه بناء على توحيد المسلحات، يجب مراجعة حظر سلسلة شهادات تعدد الزوجات في SEMA رقم ٣ لعام ٢٠١٨. السبب في أن مسلحات لا يغلق الباب لكنه لا يزال يفتحه. لأنه بإغلاق الباب أمام تعدد الزوجات، فإن التأثير على المرات الذي تتحمله النساء يشمل حقوقهن كزوجات أو مواطنات. إغلاق سيما مسلحات هو ظني فقط في حين أن مصلحة فتح فمن الواضح أن الحقيقي. من ناحية أخرى، ليس بالضرورة مع فتح شهادة الزواج، يمكن للقاضي إضفاء الشرعية بسهولة على تعدد الزوجات سيري. لذلك ، فإن الطريق الأوسط هو فتح باب الاثبات في المجموع أو لا يزال يقبل حالة زواج متعدد الزوجات ولكن مع أسباب قوية. إذا كان السبب غير قوي، يمكن للقاضي إسقاط الحكم لا.

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Tesis	ii
Lembar Pengesahan Tesis	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
Abstract	xii
ملخص البحث	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah:.....	11
C. Tujuan Penelitian:	11
D. Manfaat Penelitian:	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Devinisi Masalahah	13
B. Pembagian Masalahah:	14
C. Devinisi masalahah mursalah	17
D. Macam-macam masalahah dari sisi kekuatan.....	18
E. Cakupan Masalahah.....	26
F. Syarat masalahah menurut Syatibi	27
G. Biografi Syatibi.....	29
H. Pengaturan Poligami	31
I. Alasan-alasan Dbolehkan Poligami	32
J. Poligami Siri	35
K. PERATURAN ISBAT NIKAH	36
1. Pernikahan harus dicatat	37
2. Prosedur Isbat Nikah	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Hukum	42
D. Metode Analisis Data:	44
E. Penelitian terdahulu	45
1. Mukhtaruddin Bahrum	45

2. Ahmad Cholid Fauzi (Fakultas Hukum Universitas Semarang).	46
3. Robith Muti'ul Hakim, UIN Sunan Kalijaga. Tesis.....	47
4. Armalina (IAIN Bengkulu) Tesis.....	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Problematika Poligami Siri Atas Perempuan.....	51
1. Problem secara hukum positif.....	51
2. Problem atas hak perempuan sebagai warga negara	56
3. Problem hak perempuan sebagai Istri	58
4. Problem atas status 'Istri'	60
5. Problem Sosial	61
6. Problem dalam rumah tangga.....	62
B. Larangan Isbat Nikah Poligami Perspektif Maslahat Mursalah	62
1. Implementasi Syarat Maslahat Mursalah Syatibi.....	64
2. Jalan Tengah Isbat Nikah Poligami.....	69
3. Isbat Nikah Hal Yang Maslahat Bagi Perempuan.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu poligami yang merupakan problem sosial klasik terus menggelinding disebabkan diskusinya tidak pernah berhenti. Bagi kaum feminis dan pemerhati gender, poligami dianggap tidak berpihak kepada perempuan dan menguntungkan laki-laki. Sebab meskipun poligami secara teks syariat bersifat legal. Hanya saja dalam tataran praktisnya terdapat beberapa syarat ketat baik diatur dalam fikih maupun perundang-undangan. Pemerhati gender memandang bahwa syarat-syarat poligami itu merupakan sebuah bentuk pelecehan dimana hanya pihak laki-laki yang mendapatkan alternatif menikah lebih dari satu dengan mengesampingkan perempuan padahal risiko dan substansi syarat dalam pasal tersebut bisa terjadi tanpa memilah status gender.¹

Kaum feminis berpandangan tajam bahwa hanya karena laki-laki mampu dan memiliki finansial cukup dengan mudahnya mereka bisa melakukan poligami. Laki-laki disinyalir menggunakan iming-iming kemapanan guna memikat para perempuan untuk menjadi selir-selirnya. Fakta sosial yang menjadikan perempuan sebagai subordinat memaksa mereka menerima pilihan tersebut. Akibatnya motif laki-laki menikahi perempuan bisa jadi guna sebagai koleksi pemuas hasrat seksual agar lebih bervariasi, sedang di lain pihak, perempuan terpaksa menerima

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004) h. 135

dipoligami karena rata-rata didorong oleh ekonomi yang kurang menunjang mereka.²

Poligami perlu direnungkan kembali sebab terjadi dua cinta dalam satu rumah tangga. Hal ini menuntut kepiawaian suami dalam membagi porsi kasih sayang kepada para istrinya secara adil. Ketimpangan keadilan materi dalam rumah tangga dinahkodai oleh berat sebelahnya hati laki-laki menempatkan kasih sayangnya kepada perempuan. Hal ini menjurus kepada penyelewangan hak yang mustinya diperoleh perempuan secara adil. Artinya dua, tiga atau bahkan empat perempuan harus berkompetisi memperebutkan cinta dari satu laki-laki. Secara naluriah perempuan tidak akan rela berbagi cinta kepada pasangan lain. Kecemburuan perempuan terkadang mendorongnya berlaku negatif yang berdampak buruk pada keharmonisan keluarga. Untuk itu wacana poligami perlu ditelaah ulang mengingat terjadi kalah menang dalam pernikahan.³

Wacana terbalik mengemuka dari beberapa cendekiawan muslim. Poligami dimata mereka adalah sebuah syariat alternatif dimana dalam kondisi-kondisi tertentu kehadiran poligami mutlak harus terjadi. Seperti ketika terjadi bonus demografi jumlah populasi perempuan melebihi jumlah populasi laki-laki. Hal demikian lumrah terjadi sebab berdasarkan fakta historis kerap kali terjadi peperangan yang menyeret kaum pria harus tewas di medan perang. Di samping itu tatkala pria mengalami kemandulan atau istri tidak bisa menunaikan kewajibannya

² Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015 H. 186

³ Mahmud Huda, *Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami* (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep), Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 Nomor 1 tahun 2017

akibat sakit dan lain sebagainya. Dalam kondisi terjepit seperti ini, jika laki-laki tidak boleh berpoligami justru dapat mematikan haknya dan mengesampingkan maslahat dan manfaat pernikahan yang sepatutnya diperoleh. Dengan demikian poligami merupakan jalur kompromis antara kemaslahatan laki-laki dan perempuan.⁴

Muhammad Amin as-Syinqiti merasionalkan legalitas poligami. Dasar telaahnya merujuk atas kewajiban laki-laki yang dipikul sebagai suami jauh lebih berat dari pada perempuan. Laki-laki harus siap secara finansial dan mental sebelum menikah. Itu artinya rata-rata perempuan jauh lebih siap menikah dari pada laki-laki sebab kaum perempuan tidak perlu memikirkan hal tersebut. Jika tingkat ekonomi masyarakat rendah niscaya hanya beberapa laki-laki dewasa yang siap menikah berbanding dengan perempuan dewasa yang mayoritas telah siap dipersunting. Pilihannya cukup sulit bagi perempuan. Bersedia dipoligami dengan laki-laki yang mapan secara finansial dan mental atau menjalin pernikahan dengan laki-laki yang harus membangun dari bawah dan menempa mentalnya. Opsi demikian dipertimbangkan apabila memang poligami diakui. Jika poligami dilarang niscaya perempuan tidak memiliki pilihan. Mereka harus berebut laki-laki yang telah siap menikah yang naasnya harus ada perempuan tersingkir yang kalah.⁵

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak perempuan dalam berpoligami diatur dalam Undang-Undang perkawinan dimana poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan tujuan guna menertibkan praktik nikah poligami dan

⁴ Ali As-Shabuni, *Rawaiul Bayan*, Maktabah al-Ghazali Beirut 1980 juz 1 h. 428

⁵ Muhammad Amin as-Syinqiti, *Adlwaul Bayan Fi idlahil Quran* Darul Kutub Ilmiah, Beirut juz 3 h. 23

meminimalisir mudlaratnya. Pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suami yang hendak berpoligami harus mengajukan izin kepada Pengadilan Agama. Peraturan ini memberi sinyal bahwa rekomendasi poligami merupakan upaya pencegahan pengabaian hak-hak istri, baik istri yang lama dan baru agar segala dampak poligami dapat diantisipasi sejak dini.⁶

Keluarnya SEMA nomor 3 tahun 2018 dalam kamar peradilan agama nomor 8 yang berbunyi ‘Setiap permohonan isbat nikah poligami walaupun demi kepentingan anak tidak bisa diterima’ mempertegas bahwa izin poligami mutlak harus ditempuh guna mendapatkan legalitas. Konsekuensi melakukan nikah poligami siri yang tidak melalui prosedural berakibat atas tidak adanya kekuatan hukum tetap dan tidak bisa disahkan. Dampaknya segala akibat hukum dalam pernikahan poligami siri tidak diakui oleh Negara. Sayangnya tidak semua masyarakat mematuhi prosedural poligami. Terdapat beberapa pihak yang melangsungkan poligami siri dengan mengabaikan segala risikonya. Hal ini patut disayangkan sebab ketidakpedulian akan hukum berakibat fatal di kemudian hari yang berbuntut justru merugikan para pelakunya.

Menanggapi fenomena poligami siri, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami siri layak diisbat atau tidak. Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami siri perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami mustinya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah

⁶ Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015 H. 64

tangga. Oleh kerana itu apabila terjadi hal-hal negatif atas perempuan, Negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami siri, menimbang secara administrasi negara, perempuan bersangkutan tidak dianggap sebagai istri sah.⁷

Menurut Addin Daniar Persoalan utama hak perempuan terletak pada nafkah, waris dan keadilan suami. Perempuan poligami siri rawan terdiskriminasi oleh laki-laki karena secara payung hukum sangat lemah sehingga risiko penyelewengan hak perempuan cukup tinggi.⁸ Lebih lanjut suami harus berlaku adil dalam besaran nafkah yang diberikan kepada istri-istrinya meliputi nafkah tempat tinggal, makan, pakaian dan pelengkap lainnya. Artinya suami bisa jadi memperlakukan istri poligami siri seenak hatinya dengan memberi bagian kecil kepada istri tersebut tanpa peduli dengan yang namanya berlaku adil. Bisa jadi perempuan yang dipoligami siri juga mendapatkan kesenjangan dalam pembagian waktu dan bagaimana suaminya memperlakukannya.⁹

Mohammad Roqib juga lebih setuju agar pintu isbat nikah poligami siri dibuka. Adapun apakah permohonannya dikabulkan atau tidak itu bergantung atas kasuistik dan penilaian maslahat dari hakim. Roqib menganggap bahwa hakim sepatutnya tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis menyangkut isbat nikah poligami terkait tidak atau bolehnya ditangani. Hakim seharusnya mengedepankan prinsip kemaslahatan guna memberi keadilan bagi para pihak. Menimbang semua dasar-

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Laporan Telaah Perkawinan Siri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat," H. 32.

⁸ Addin Daniar Syahdan, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019) H. 452

⁹ Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, Jurnal AN NISA'A, VOL. 8, NO. 1, JUNI 2013 54

dasar hukum didasarkan atas dasar kemaslahatan. Jika hakim hanya merujuk atas dasar yuridis mengesampingkan kemaslahatan sama halnya hakim mematkan tujuan hukum itu sendiri.¹⁰

Nurul Hikmah lebih memilih membolehkan isbat nikah poligami siri guna melindungi perempuan. Tidak dipungkiri nikah siri terlebih poligami adalah madlarat. Namun bukan berarti ketika perempuan terjebak poligami siri dibiarkan begitu saja. Negara harus tetap hadir memberi jaminan perlindungan hukum yang memadai untuknya. Oleh karena itu berdasarkan asas kemaslahatan, isbat nikah siri harus diperbolehkan guna menghindari terbengkalainya hak-hak perempuan sebagai istri. Jangan sampai perempuan menjadi tidak terjamin secara hukum atas pernikahan sirinya dan menjadi semakin tidak terjamin dengan tidak bisa mendapatkan legalitas hukum atas hak-haknya.¹¹

M. Yazid Fathoni lebih menilai dari sudut keabsahan pernikahan. Meski disebutkan adanya keharusan pencatatan pernikahan dan izin poligami, namun bukan berarti hal tersebut menjadi syarat keabsahan pernikahan. Sebab Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sendiri menitik beratkan asas keabsahan pernikahan pada pasal 2 ayat 1 yang bunyinya bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama. Oleh karena itu apabila secara ajaran agama pernikahan telah sah namun tidak dicatatkan, maka Negara membuka kesempatan isbat nikah poligami. Seandainya pencatatan itu adalah indikator

¹⁰ Mohammad Roqib, *Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016; H. 7

¹¹ Nurul Hikmah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam* Lentera: Journal of Gender and Children Studies Volume 2 Issue 1, July 2020 h. 52

keabsahan nikah, niscaya tidak akan ada istilah isbat nikah. Syarat pencatatan dan izin poligami dari hakim hanya bersifat keabsahan administratif. Oleh karena itu Pengadilan Agama mestinya tidak etis menolak pengajuan isbat poligami siri mengingat secara agama hal tersebut adalah sah.¹²

Wacana kontra dengan melarang isbat poligami juga tercermin dari beberapa kajian pakar hukum sebagaimana Mukhtaruddin Bahrum pada dasarnya mengamini bahwa isbat nikah poligami siri memang menguntungkan perempuan. Namun dampak yang lebih besar terjadi apabila isbat nikah poligami siri benar-benar diterima sepenuhnya. Apabila poligami siri itu dikabulkan atau isbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penegasian (peniadaan atau penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin. Undang-undang perkawinan maupun peraturan pemerintah turunannya tidak memberi hukuman atas pelaku poligami siri. Oleh karena itu cukuplah tertutupnya pintu isbat poligami sebagai teguran keras bagi masyarakat yang berkeinginan melakukannya.¹³

¹² M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Siri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal IUS Vol VI Nomor 1 April 2018 hlm, 128

¹³ Mukhtaruddin Bahrum: *Problematika Isbat Nikah Poligami Siri*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 2019 h. 197

Cucu Solihah cenderung mendukung pelarangan isbat nikah poligami pasalnya jika isbat nikah poligami siri diperbolehkan, niscaya akan marak terjadinya poligami siri di tengah masyarakat. Padahal madllarat tidak dicatatkan saja sudah cukup besar. Terlebih apabila dilakukan secara siri. Cucu Solihah juga menegaskan bahwa lebih baik mengambil tindakan preventif atas kemadllaratan yang bisa berdampak negatif atas masyarakat.¹⁴ Hal senada juga dipaparkan oleh Yusriyah bahwa pelegalan isbat poligami siri justru membuka potensi meroketnya angka pernikahan siri di tengah masyarakat. Kekhawatiran terjadinya penyelundupan hukum dengan mengajukan isbat nikah poligami bisa menjadi pintu bagi pihak-pihak yang hendak mempercepat pelegalan poligaminya.¹⁵

Revita Aldia Putri berpandangan bahwa meskipun banyak dilapangan Pengadilan Agama mengabulkan isbat poligami siri. Namun mestinya hal ini tidak terjadi. Mengingat kedudukan Sema nomor 3 tahun 2018 berlaku mutlak bagi para hakim. Oleh karena itu memberi putusan yang menyalahi instruksi SEMA tersebut merupakan bentuk penyimpangan dan pelanggaran kaidah-kaidah dalam menetapkan putusan. Yurisprudensi di mata Revita hanya bisa diperlakukan sesuai kaidahnya. Yakni dikala hakim tidak menemukan jawaban berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Karena instruksi Sema Nomor 3 tahun 2018 sangat lugas, semestinya peraraturan itulah yang dijadikan bahan rujukan.¹⁶

¹⁴ Cucu Solihah, *Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 376-384

¹⁵ Yusriyah, *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*, Al-Hamra, Jurnal Studi Islam Volume 1, No. 1, Februari, 2020: 69-80

¹⁶ Revia Aldia Putri, *Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)* Jurnal Indonesian Notary Vol. 2 nomor 4 tahun 2020 h. 564

Abdul Edo Munawwar berwacana bahwa efektifitas hukum dalam pencatatan perkawinan sekaligus izin poligami mustinya dijunjung dalam peradilan. Toleransi yang diberikan kepada masyarakat justru semakin memperparah praktik-praktik poligami siri. Hukum seharusnya tidak kompromis sehingga tampak bahwa peraturan perundang-undangan bisa disetir atau dimanipulasi. Ketika undang-undang menetapkan bahwa izin poligami harus berdasarkan keputusan hakim. Maka seyogyanya hal tersebut lah yang dijadikan rujukan guna terciptanya efektifitas hukum. Secara tidak langsung Abdul Edo hendak menyampaikan bahwa dengan ditutupnya pintu isbat nikah bukan berarti perempuan tidak mendapatkan payung hukum. Perempuan tetap dapat menerima payung hukum dengan pengajuan izin poligami oleh suaminya.¹⁷

Penelitian ini sejatinya hendak menguak realitas dan relevansi isbat nikah poligami. Kajian demikian menarik dilakukan sebab setelah keluarnya Sema nomor 3 tahun 2018, pintu isbat poligami ditutup total sehingga perempuan tidak bisa memiliki alternatif guna mengesahkan pernikahannya. Kajian ini secara implisit berusaha mendudukkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami siri. Apakah dengan diterbitkannya sema tersebut dapat memberi kemaslahatan seperti menertibkan praktik poligami siri atau justru menjadi buah simalakama, justru menjadi mudlarat atas nasib perempuan sehingga terkatung-katung tidak bisa mendapatkan payung hukum. Problematika demikian patut direnungkan sebab fakta poligami siri di masyarakat memang terjadi sehingga

¹⁷ Abdul Edo Munawar, *Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)* Jurnal Hukum Islam, Vol. 17 Juni 2019 H. 38

Mahkamah Agung menerbitkan aturan dalam sema nomor 3 tahun 2018 tersebut. Selanjutnya efektifitas Sema nomor 3 tahun 2018 juga perlu ditelaah jika secara paralel dibaca dari sudut kemaslahatan perempuan. Bisakah perempuan mendapatkan jaminan hukum atas hak-haknya sebagai istri atau sebaliknya.

Kajian masalah mursalah memiliki relevansi dan sinergitas terhadap kasus isbat nikah poligami siri. Masalah mursalah berbicara terkait kasuistik yang tidak memiliki dasar sumber al-Quran maupun hadis secara konstan. Artinya masalah mursalah bersinggungan dengan masalah baru yang tidak dikupas dalam al-Quran hadis, terlebih diulas langsung oleh para ulama¹⁸. Isbat nikah atau penetapan nikah tidak dikupas oleh teks al-Quran hadis. Begitupun jika ditelusuri dari kitab turats belum ada yang mengupas masalah demikian sehingga sangat relevan sekali jika isbat nikah poligami siri dikuak melalui pendekatan masalah mursalah. Subtansi masalah mursalah adalah menjadikan kemaslahatan sebagai kajian atas sebuah kasus sehingga memunculkan sebuah hukum. Jika ditelisik lebih detail adanya isbat nikah maupun larangannya pada dasarnya juga karena mempertimpangkan aspek kemaslahatan. Oleh karena itu perlu ditelaah terkait sinergitas kemaslahatan isbat nikah, khususnya dalam kasus poligami siri agar arah kemaslahatan dapat terakomodir dengan baik.

Telaah masalah mursalah yang digunakan merujuk atas masalah mursalah imam Syatibi dimana aspek pertimbangan yang maslahat versi beliau merujuk pada tiga hal. Pertama rasional, ke dua sesuai dengan maksud syariat

¹⁸ Muhammad Ahmad Burkab, *Maslahat Mursalah Wa Atsaruhu Fi Fikhi al-Islami*, (Dar Ihya' Turats, 2002) H. 59

secara umum dan ke tiga demi menjaga hal *dlaruri* dan menghilangkan kesusahan¹⁹. Kajian masalah Syatibi relevan dengan penelitian ini mengingat pertimbangan maslahat yang digunakan beliau memiliki dasar yang kuat dan layak dijadikan acuan. Berbeda dengan versi maslahat ulama lain yang cenderung mempersulit aspek pertimbangannya.

Kemaslahatan dalam isbat nikah poligami siri memiliki koherensi yang sangat vital dengan kajian maslahat mursalah, mengingat muatan kemaslahatan yang menjadi parameter dalam kajian ini harus benar-benar memiliki relevansi dan dapat diwujudkan secara nyata. Imbal balik maslahat mursalah dengan isbat nikah poligami siri apakah kemaslahatannya justru berada pada dilegalkan isbat nikah poligami atau sebaliknya sebagaimana ketetapan Sema nomor 3 tahun 2018. Atas hal inilah peneliti berusaha menguak kasus isbat nikah poligami siri ditinjau dari kacamata maslahat mursalah sesuai dengan ketetapan sema nomor 3 tahun 2018 dengan mengintergrasikannya ke dalam hukum positif dalam hal implementasi isbat nikah poligami.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah problematika isbat poligami siri atas perempuan?
2. Bagaimanakah larangan isbat poligami pada SEMA nomor 3 tahun 2018 perspektif masalah mursalah Syatibi?

C. Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui problematika yang dihadapi oleh perempuan atas isbat poligami siri.

¹⁹ Syatibi, *I'tisham* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2005) Juz 2 h. 135

2. Mengetahui relevansi larangan isbat nikah poligami siri pada SEMA nomor 3 tahun 2018 perspektif masalah mursalah Syatibi.

D. Manfaat Penelitian:

1. Secara Teoritis: Menjadi wawasan terkait problematika isbat poligami siri yang dihadapi perempuan sekaligus menjadi analisis terkait peraturan larangan isbat nikah poligami siri pada SEMA nomor 3 tahun 2018
2. Secara Praktis:
 - a. Institusi Pendidikan: Menjadi bahan kajian terbaru dalam memahami materi isbat nikah poligami siri sinergi antara hukum positif dengan teori masalah berikut problematika poligami siri.
 - b. Institusi pemerintah: menjadi bahan telaah pertimbangan dan kebijakan terkait relasi hubungan pernikahan poligami siri bagi masyarakat Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Devinisi Maslahah

Maslahat merupakan pembanding dari mafsadah. Dengan kata lain segala hal yang mengandung nilai manfaat baik dengan memproduksi manfaat atau menjauhkan dari bahaya disebut sebagai maslahat²⁰. Secara terminologi maslahat ialah segala hal yang merupakan tujuan pensyariatan berupa perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan hartan²¹. Detailnya segala hal yang berupaya menguatkan dan melestarikan terhadap lima hal tersebut disebut sebagai maslahat. Sebaliknya, segala bentuk ancaman dan penodaan atas lima prinsip di atas sebagai mafsadah²².

Ibnu Taimiyah menilai bahwa pengertian maslahah di atas kurang lengkap. Beliau menambahkan; “Serta dalam nash syariat tidak ditemukan hal yang menafikan.”²³ Penambahan devinisi secara tidak langsung guna mengakomodir maslahat mursalah, dimana maslahat yang dikupas oleh maslahah mursalah merupakan maslahat yang tidak berlawanan atas nash-nash tertentu.

Islam memberi ruang istimewa atas peran maslahat, mengingat dasar syariat islam adalah guna merealisasikan kemaslahatan serta meniadakan kemudlaratan²⁴.

Ke Dua agenda ini adalah topik besar yang menjadi poros terciptanya hukum-

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, (Darul Kutub Ilimah, Beirut, 2003) juz 10 h. 512

²¹ Said Ramadhan al-Buti, *Dlawabitul Maslahah* (Muassasatur Risalah, Beirut) h. 22

²² Ghazali, *al-Mustasfa* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2009) juz 1 h.414

²³ Ibnu taimiyah, *Majmu' fatawa* juz 10 h.512

²⁴ Ibnu taimiyah, *Majmu' fatawa* juz 10 h.512

hukum syariat. Izzudin bin Abdissalam menyampaikan: “Setiap orang yang memiliki konsentrasi atas syariat serta menggeluti makna al-Quran dan Hadits, niscaya dia akan mengetahui bahwa segala hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kemudlaratan atau merealisasikan keduanya sekaligus. Begitupula segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna menghindari kemudlaratan atau merealisasikan kemaslahatan. Syariat begitu serius memperhatikan hal tersebut”.²⁵

Pada prinsipnya islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Dimana keadilan selalu menjadi nuansa khas hukum-hukum syariat. Termasuk salah satu dari prinsip islam adalah keadilan dimana Syariat islam pada dasarnya hadir dengan tujuan menegakkan keadilan. Penerapan Syariat islam harus diimbangi dengan adil baik adil sejak dalam tataran konseptual atau tataran implementasi²⁶. Artinya jangan sampai keadilan yang ada dalam konsep tercerabut ruhnya ketika diimplementasikan. Maslahat adalah tujuan pokok syariat. Adapun keadilan adalah salah satu perangkat mutlak yang berfungsi untuk merealisasikan hal tersebut. Maslahat dan keadilan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibnu Qayyim: “Syariat pondasi dan prinsipnyanya adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat secara totalitas adalah keadilan, kasih sayang dan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi penyimpangan, kasih sayang menjadi sebaliknya dan maslahat

²⁵ Izzudin bin Abdissalam, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisaril Maqasid*, (Darul Kutub Ilmiah, Beirut 2004) h.53

²⁶ Salahuddin Muhammad Qasim, *Atsarul Maslahah fi siyasah as-Syar'iyah* juz 186

menjadi mafsadah mkakah bukan termasuk dari syariat. Sebab syariat adalah keadilan dan kasih sayang Allah Swt atas hambanya”²⁷.

B. Pembagian Maslahah:

1. Maslahah Mu'tabarah

Masalahah mu'tabarah adalah kemaslahatan atas kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Artinya kasus seperti jihad, memandang wajah perempuan ketika dilamar, hukuman bagi yang menenggak anggur, larangan menyetubuhi istri yang sedang haid dan lain sebagainya merupakan beragam kasus yang penerapan hukumnya dianggap maslahat oleh syariat²⁸. Dengan demikian segala kasus-kasus yang dikupas langsung oleh al-Quran atau Hadis yang bermuara atas dasar kemaslahatan disebut sebagai *maslahah mu'tabarah*.

2. Maslahat Mulgha

Maslahah mulgha adalah kemaslahatan yang tertolak. Dimana syariat menganggap kasus-kasus demikian justru tidak memiliki nilai maslahat yang dianggap layak, Seperti kemaslahatan riba dalam melipat gandakan uang pinjaman²⁹. Maslahat seperti ini dibatalkan dengan ayat:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah Swt halalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

²⁷ Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqi'in*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut Juz 3 h. 11

²⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* h. 192

²⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* h. 192

Begitupun maslahat dalam menenggak anggur atau berjudi. Hal demikian telah ditolak dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah:90).

Begitupula maslahat dalam pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan ayat:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Dan bagi laki-laki berhak mendapat dua bagian perempuan” (QS. An-nisa: 11)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat yang menyelisihi ketentuan syariat atau bahkan bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, disebut sebagai *maslahah mulgha* atau maslahat yang dibatalkan oleh syariat.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan atas kasus-kasus yang tidak memiliki dasar hukum secara khusus dalam al-Quran hadis serta tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat secara umum yang mampu mencerminkan nilai dan tujuan syariat islam itu sendiri (Allah Swt)³⁰. Masalahah mursalah

³⁰ As-Syatibi, *al-Muwafaqat* juz 2 h.17

bersinggungan dengan problematika kekinian dimana kasus-kasus demikian dijawab menggunakan pendekatan maslahat karena dianggap mencerminkan maksud dan tujuan syariat Islam. Konteks kasus yang menggunakan maslahat mursalah telah terjadi pada masa sahabat nabi dimana urusan pembukuan al-Quran tidak diatur dalam al-Quran hadis. Meski begitu, pembukuan ini merupakan hadiah tersebar dari pemikiran para sahabat sehingga teks dan makna al-Quran tetap terjaga orisinalitasnya. Dengan demikian, meskipun tidak ada ayat atau hadis yang memerintahkan pembukuan al-Quran namun mengingat manfaat yang begitu besar, maka pembukuan itu merupakan bagian dari anjuran syariat islam sebab mencerminkan maksud syariat untuk terus memproduksi kemaslahatan.

C. Devinisi *maslahah mursalah*

Maslahah mursalah memiliki derivasi arti diantaranya:

1. Al-Ghazali: Nilai-nilai yang disarikan dari maksud syarak yang tertuang al-Quran hadis bukan diambil dari satu dalil khusus, melainkan merupakan rangkuman dari berbagai macam dalil³¹.
2. Amudi: Maslahat atas kasuistik yang tanpa mengandung dasar nash apakah dipertimbangkan atau dibatalkan³².
3. Tajuddin as-Subki: Maslahat sebuah kasus yang tanpa ada dasar nash syarak dan dapat diterima secara rasional³³.

³¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* juz 1 h. 429

³² Amudi, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2003) juz 3 h. 80

³³ As-subki, *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnul Hajib*, (Darul Fikr, Beirut, 2004) juz 4 h. 527

Dari derivasi arti tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah nilai-nilai maslahat umum yang tidak memiliki muatan dasar nash syarak apakah dipertimbangkan atau dibatalkan. Hanya saja maslahat tersebut memiliki korelasi terhadap maqasid syariah dan kaidah syariah umum. Dengan demikian kemaslahatan-kemaslahatan atas sebuah kasus tertentu yang tidak diulas langsung dalam al-Quran dan hadis disebut sebagai masalah mursalah. Itu artinya, tatkala muncul problematika yang jawabannya tidak terkandung dalam nash syarak secara spesifik atau hukum sejenis yang dapat dianalogikan guna mengatasinya, kemudian ditemukan jawabannya setelah mempertimbangkan kemaslahatan dengan mengomparasikan terhadap maksud syariat, maka jawaban tersebut sudah dapat dijadikan dasar hukum. Dalam arti apabila kasus-kasus baru yang pemecahannya hanya dari faktor kemaslahatan, maka dapat dijadikan pijakan dan sumber hukum.

D. Macam-macam masalah dari sisi kekuatan

1. Masalah dlaruri

Maslahah Dlaruri merupakan kemaslahatan yang menjadi tumpuan daya hidup manusia, sekira jika kemaslahatan itu tercederai akan sangat berdampak negatif. Syariat berusaha menertibkan kehidupan manusia agar hal-hal urgen yang menjadi penopang kehidupan tidak terbengkalai. Jika manusia hidup dibiarkan liar tanpa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi niscaya keteraturan akan sirna sehingga kehidupan manusia layaknya binatang³⁴. Sebab rasa haus duniawi akan menyebabkan manusia satu dengan

³⁴ Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah* (Muassasah Tunis, Tunisia) h.300

yang lain saling menindas, saling membunuh, saling menciderai dan lain sebagainya.

Maslahah dlaruri oleh al-Ghazali dirumuskan ke dalam lima hal: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Ulasan lengkapnya segala bentuk pelestarian atas agama meliputi akidah, ubudiyah dan muamalah serta segala bentuk yang mengancam eksistensi agama seperti munculnya penjajahan sehingga timbul syariat berjihad adalah termasuk bagian dari *masalah dlaruri*³⁵. Imam Malik sendiri bahkan juga menggunakan metode *masalah mursalah* dalam konteks *dlaruri* terkait kasus bolehnya memukul terduga kuat pencuri. Walaupun masih dimungkinkan terduga tersebut tidak salah. Imam Malik lebih cenderung demikian dengan menimbang maqasid syariah demi menjaga harta orang-orang³⁶.

2. Maslahat *hajiyah*

Maslahat hajiyat berbicara bagaimana manusia bisa hidup lebih tertib dan mudah sehingga hal-hal yang berpotensi menyulitkan dan memperlambat harus dihilangkan. Persoalan hajiyat terletak bagaimana manusia bisa lebih terorganisir kehidupannya sehingga hal-hal yang menunjang adanya kemudahan hidup masuk kategori *hajiyat*³⁷. Maslahat *hajiyah* berorientasi agar manusia tidak terkungkung dalam jurang kesulitan. Misal adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain sebagainya yang kesemuanya menjadikan hidup manusia jauh lebih mudah guna memenuhi

³⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* h. 424

³⁶ Samiah Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam* 56

³⁷ As-Syatibi, *al-Muwafaqat* juz 2 h. 9

hajat hidupnya. Contoh kasus haji di masa kini adalah pembatasan usia menikah perempuan dan laki-laki yang mana tujuan utamanya adalah agar masing-masing calon pengantin lebih dewasa dan memiliki kematangan yang cukup guna mengarungi bahtera rumah tangga. Masing-masing calon pengantin lebih mengerti dengan hak dan kewajiban masing-masing³⁸.

3. Masalah *tahsini*

Maslahat tahsini berbicara tentang bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. Maslahat tahsini lebih berorientasi atas kelengkapan kebutuhan manusia yang semakin meningkatkan taraf hidupnya. Aspek hukum yang diulas adalah bagaimana agar tatanan yang berlangsung menjadi lebih baik dan bermartabat³⁹. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *maslahah tahsini* adalah segala hal yang bermaksud guna menyempurnakan umat Islam dalam kehidupannya. Umat Islam bisa merasakan kehidupan yang lebih madani dan tercipta struktur sosial yang patut ditiru⁴⁰. Contoh maslahat tahsini adalah menutup aurat, etika istinja', etika makan dan minum dan ibadah-ibadah sunah yang kesemuanya mengantarkan hidup manusia lebih berkualitas. contoh *maslahah mursalah tahsini* pada masa modern penggunaan media-media terkini guna sebagai batu loncatan untuk memudahkan pendidikan, medis, ekonomi dan lain sebagainya sehingga manusia jauh lebih efisien dan taraf hidupnya lebih meningkat.

³⁸ Samiah Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam* 58

³⁹ As-Syatibi, *al-Muwafaqat* juz 2 h. 9

⁴⁰ Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah Al-Islamiah* h. 313

Pemetaan macam-macam maslahat ke dalam *dlaruri*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* sangat penting guna mengutamakan salah satu maslahat apabila terjadi pertentangan. maslahat *dlaruri* menduduki peringkat pertama disusul dengan maslahat *hajiyah* dan terakhir *tahsini*. Jika ditaruh dalam sebuah kasus, ketika seseorang sedang sangat lapar sementara tidak ada makanan lain kecuali benda najis seperti daging babi, maka ia harus mengonsumsinya. Sebab derajat menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) termasuk *mashalah dlaruri* yang lebih diprioritaskan dari pada menjauhi benda najis yang terkategori *mashalah tahsini*⁴¹.

Terjemah dari menjaga lima unsur pokok syariat bukan diterjemahkan hanya untuk memberikan proteksi atau perlindungan. Melainkan makna menjaga di sini dinilai dari dua sudut. Pertama mewujudkan, dengan arti meningkatkan dan mengembangkan. Ke dua meniadakan, dengan arti meniadakan hal yang merusak dan merugikan baik pada masa sekarang atau mendatang. Konsentrasi Islam atas lima hal pokok di atas adalah bagaimana memelihara dan memaksimalkan potensi sebaik mungkin sekaligus memberikan pengawasan dan potensi agar kemaslahatan tidak tersia-siakan. Dengan demikian akan diulas bagaimana lima hal pokok agama secara terperinci dari dua sisi yakni mewujudkan dan meniadakan sebagai berikut:

1. *Hifdzud Din* (Menjaga agama).

a) Aspek mewujudkan

Syariat menganggap *hifzul dzin* sebagai pokok dari kemaslahatan. Oleh karena itu banyak sekali ragam syariat yang berhubungan dengan *hifdzul dzin*.

Agar mewujudkan dan menguatkan spiritual seseorang, syariat mewajibkan

⁴¹ As-syatibi, *Al-Muwafakat* juz 2 h. 11

salat, zakat, puasa dan haji. Artinya disadari atau tidak, Islam mengajarkan banyak hal berkaitan dengan ibadah sebagai wasilah agar keimanan seseorang semakin kokoh dan hubungannya dengan sang khaliq semakin baik. Mewujudkan *hifzul dzin* adalah dengan menunaikan ajaran-ajaran syariat dengan baik dan benar.

b) Aspek meniadakan

Jihad adalah buah dari kehendak syariat guna menjaga agama. Jihad di sini tidak diterjemahkan semata hanya berperang. Melainkan jihad adalah upaya perlindungan diri atas serangan atau serbuan musuh. pada dasarnya jihad adalah tindakan defensif bukan ofensif. Artinya segala bentuk yang mengancam eksistensi agama baik perang dengan kontak fisik, budaya, bahasa, teknologi, ekonomi, olahraga dan lain sebagainya harus diantisipasi sedini mungkin. Jangan sampai islam dan pengikutnya diinjak martabatnya karena kalah dalam banyak bidang sehingga banyak masyarakat muslim tidak bisa khusyu' menjalankan amanah yang kuasa untuk selalu dengan tekun tunduk beribadah kepadanya.

2. *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa)

a) Aspek mewujudkan

Syariat memerintahkan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dengan cara memakan segala yang halal dan menjauhi yang haram. Konsumsi harian juga tidak berlebihan, sebab berdampak negatif bagi kesehatan. Di sisi lain Syariat menghalalkan mengonsumsi hal yang haram haram pada saat darurat. Bahkan hukumnya wajib, Hal ini dimaksudkan guna

menjaga keberlangsungan nyawa seseorang. Di samping itu, kewajiban menafkahi anak dan istri serta memeliharanya agar dapat berkembang dengan baik dan layak merupakan bagian pelestarian jiwa, mengingat apabila anak-anak dibiarkan menghidupi dirinya sendiri, sudah barang tentu nyawa mereka terdabaikan, sebab tidak mampu menafkahi diri sendiri.

b) Aspek meniadakan

Islam mensyariatkan qisas, had dan ta'zir atas tindakan kriminalitas dan pelanggaran sehingga menciptakan unsur jera dan memunculkan ketertiban. Penjatuhan hukuman ini dimaksudkan agar orang tidak main-main dengan nyawa dan berbagai macam fungsi anggota tubuh seperti tangan, kaki dan anggota lainnya. Terkait upaya kriminalitas, Islam mensyariatkan *daf'u shail* (melawan pelaku kriminal). Setiap penjahat yang hendak membunuh orang lain, hendak memerkosa atau mencuri, maka seseorang dapat membela diri dari orang tersebut dengan membunuhnya tanpa dikenai hukuman apapun.

3. *Hifdzul Aql* (Menjaga akal)

a) Aspek mewujudkan

Syariat sangat mendorong pemeluknya menuntut ilmu dan mengembangkan potensi akal yang dimilikinya. Segala hal yang meningkatkan potensi dan kecerdasan otak, baik dengan melakukan telaah, riset maupun lain sebagainya adalah perwujudan dari menjaga akal. Ungkapan merenungi ciptaan Allah Swt sangat banyak dianjurkan dalam al-Quran. Hal ini menandakan bahwa menggunakan potensi akal adalah salah satu bentuk menyukuri nikmat Allah Swt agar umat manusia dapat meresapi kebesarannya.

a) Aspek meniadakan

Islam sangat memperhatikan segala hal yang berpotensi merusak atau mengurangi daya akal. Syariat Islam mengharamkan menenggak khamr dan menggunakan segala macam narkoba. Sebagai bentuk penanggulangan, syariat menegakkan hukuman atas peminum dan pengguna narkoba agar memberikan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi yang lainnya. Dalam konteks meniadakan ini, dapat diterjemahkan pula bahwa segala unsur yang menghalangi atau menghambat pengembangan pendidikan dan wawasan pengetahuan harus segera diatasi seperti tidak tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai dan kurangnya tenaga pendidik mumpuni.

4. *Hifdzun Nasl* (Menjaga keturunan)

a) Aspek mewujudkan

Islam memperhatikan keberlanjutan generasi manusia agar terus dilestarikan dengan cara yang baik yakni dengan menyariatkan pernikahan. Syariat memotivasi umat manusia agar meregenerasi keturunan dengan cara yang bermoral. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak bebas melampiaskan hasrat biologisnya semena-mena. Agar tidak amoral seperti binatang, dimana hubungan seksual dilampiaskan semena-mena hingga tidak jelas hubungan bapak dan anak. Bahkan sampai anak menghamili ibunya sendiri. Syariat mendorong umat manusia menciptakan generasi yang berkualitas dengan membenahi pola relasi antara lawan jenis sehingga batas-batas antara dua makhluk bisa dipahami sebagai bentuk pengendalian yang manusiawi.

b) Aspek meniadakan

Syariat mengharamkan hal-hal yang dapat merusak keturunan disebabkan melakukan hubungan yang tidak baik. Larangan zina, liwat serta hal-hal yang dapat menjerumuskan hubungan badan seperti berciuman, bercumbu, berpelukan dan lain sebagainya yang umumnya dimotori oleh adanya *khalwah* adalah prinsip Islam. Agama samawi tidak mengenal hubungan bebas atau semacamnya. Larangan ini dikuatkan dengan penegakan hukuman atas orang yang melakukan tindak asusila.

5. *Hifdzul Mal* (Menjaga harta)

a) Aspek mewujudkan

Islam menilai harta berperan penting bagi kehidupan manusia. Mengingat setiap orang memikul beban tanggung jawab finansial atas dirinya dan keluarganya. Islam menganjurkan umatnya mencari harta halal bukan dengan mengemis bahkan mengambil harta orang lain secara lalim. Komitmen Islam adalah mengembangkan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari variasi syariat yang banyak menganjurkan anjuran membantu fakir miskin. Harta diposisikan sebagai media bersinergi agar bisa saling tolong menolong membantu mereka yang sedang kesulitan. Dengan memiliki harta, seseorang dapat mengerjakan ibadah berupa sedekah, hadiah, zakat dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi orang lain.

b) Aspek meniadakan

Syariat melarang perbuatan lalim dalam menghasilkan uang. Larangan mencuri, menjual dengan curang dan lain sebagainya adalah bentuk pencegahan dari adanya pengambilan harta orang lain dengan cara yang lalim. Secara tidak

langsung peraturan demikian sebagai upaya pemberian jaminan perlindungan atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Islam juga melarang riba, penipuan dan suap yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jeratan permasalahan finansial. Fokus perlindungan Islam terhadap harta adalah dengan mengupayakan pembersihan segala bentuk pengerukan harta orang lain dengan cara yang batil.

E. Cakupan Masalah

1. Masalah ‘*ammah*

Masalah ‘*ammah* merupakan kemaslahatan yang secara umum berhubungan dengan hak-hak manusia. Kemaslahatan ini bersinggungan dengan komunitas manusia tanpa melihat individu. Karena masalah ‘*ammah* berperan guna memperbaiki dan meningkatkan kehidupan manusia secara umum seperti berdakwah, mengajar, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya⁴². Al-Ghazali memberi contoh kasus masalah *ammah* dengan dilegalkan membunuh orang yang membuat onar dengan gemar merenggut harta orang lain secara aniaya bahkan tanpa segan membunuh para korban, dengan maksud demi menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Hanya saja hal ini perlu dilakukan apabila penjara atau hukuman sejenis dinilai sudah tidak efektif⁴³.

2. Masalah *khâs*

⁴² Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah Al-Islamiah* h. 313

⁴³ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* h. 423

Maslahat *khâs* adalah kemaslahatan yang berkaitan atas hak-hak manusia secara individual. Kemaslahatan ini bersinggungan dengan perorangan tanpa manusia secara komunal. Apabila memiliki kaitan dengan hak orang lain hanya sebatas hasil akhirnya saja seperti pencegahan *tasâruf* (pembelanjaan harta) atas orang gila yang akan bermanfaat baginya ketika telah sembuh atau bermanfaat bagi ahli warisnya ketika telah meninggal⁴⁴. Al-Ghazali mencontohkan dengan diperbolehkannya mengajukan fasakh nikah bagi istri yang ditinggal pergi suami tanpa kabar. Hal ini disebabkan membiarkan seorang perempuan ditinggal pergi oleh suaminya tanpa ada kabar, apakah sang suami masih hidup atau telah meninggal sangat merugikan perempuan. Mereka menyandang status sebagai istri tanpa ada yang menjaga dan menafkahi⁴⁵.

F. Syarat masalah menurut Syatibi

Syatibi memberikan syarat-syarat terkait penerapan masalah mursalah sebagaimana berikut:

1. Masalah bersifat rasional

Kemaslahatan dalam sebuah kasus harus dapat dicerna tidak abstrak dan bias. Artinya kemaslahatan syariat yang berupa ibadah *mahdah* tidak tergolong dari hal ini, mengingat karakteristik ibadah bersifat dogmatis yang mengatur urusan manusia dengan tuhan yang terlepas dari rasionalitas.

⁴⁴ Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah Al-Islamiah* h.86

⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* h. 423

Maslahat hanya berlaku umum pada urusan non ubudiyah seperti muamalah yang kaitannya adalah hubungan seorang manusia dengan manusia lain, satu komunitas dengan komunitas lain. Rasio maslahat mendorong kasus-kasus baru harus dicerna dan ditelaah dengan teliti apakah mengandung maslahat yang dikandung benar-benar rasional sehingga dapat menjamin maqasid syariah.

2. Sesuai dengan maqasid syariah secara umum

Keberadaan maslahat harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah bukan malah bertolak belakang. Maslahat dikembangkan guna mewujudkan maksud syarak dimana kasus-kasus baru terus bermunculan sedang bahan hukum dari al-Quran hadis tidak dapat diproduksi lagi. Oleh karenanya Kasus-kasus yang memiliki kemaslahatan perlu dikaji apakah telah mendekati atau sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya memahami korelasi maslahat sebuah kasus dengan maqasid syariah agar kemaslahatan yang dicakup memiliki kontribusi dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam berupa penjaminan atas hal pokok manusia.

3. Mendukung sekunder (*dllaruri*) serta menghilangkan kesusahan.

Maslahat memiliki potensi pengembangan dan pemenuhan atas hal-hal sekunder serta memberikan jaminan proteksi atas berbagai kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Maslahat memiliki sinergitas kuat guna mengayomi fungsi sekunder manusia. Di samping itu maslahat juga berperang penting guna memenuhi hal-hal tersier dimana fokus maslahat adalah dengan memberikan kemudahan bagi manusia. Dengan demikian

masalah berbicara dua hal sekaligus. Pentingnya perang penjaminan atas hal dlaruri dan hajiyyat yang memberikan efek berantai bagi keberlangsungan hidup manusia.⁴⁶

4. Yakin terdapat masalah

Penggunaan masalah guna menjawab suatu kasus harus didasarkan adanya masalah hakiki bukan atas dasar asumsi atau persepsi. Menggunakan masalah yang sifatnya hanya *dzanni* (asumtif) belaka bukan menjadi pertimbangan syarak.⁴⁷

G. Biografi Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi as-Syatibi. Beliau berkebangsaan Andalusia. Lahir di Granada wafat pada tahun 790 H atau 1388 M pada hari selasa. Syatibi merupakan ulama terkenal pada abad 14. Nama kunyah beliau sendiri adalah Abu Ishaq. Dalam catatan sejarah, beliau tumbuh kembang di bumi Andalusia. Beliau menimba ilmu dari cendikiawan di sana.

A. Guru

Imam Syatibi berguru kepada banyak ulama diantaranya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Fikhar al-Biri. Kepada gurunya ini, Syatibi berguru banyak hal disiplin ilmu. Bahkan pernah imam syatibi mengkhataamkan qiraat sab'ah dalam sekali majelis dengan gurunya ini.

⁴⁶ Syatibi, *I'tisham* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2006) juz 2 h. 129

⁴⁷ Nurrudin al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* juz 2 h. 140

Guru beliau lainnya adalah Abu Ja'far Ahmad as-Syakuri yang terkenal mengajarkan ilmu nahwu. Abu Sa'id Farj bin Qasim yang merupakan mufti Granada sekaligus sebagai imam besar masjid Granada yang juga sebagai pengajar di Madrasah an-Nasriyah. Di samping itu beliau juga menimba ilmu kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang terkenal sebagai mufassir dan Abu Abdillah Muhammad bin Abi al-Hajjaj.

Imam Syatibi juga menimba ilmu kepada Qadi Granada yang bernama Abul Qasim Muhammad bin Ahmad as-Syarif. Sedang dalam hal usul fikih, beliau berguru kepada Abu Ali Mansur bin Muhammad Az-Zawawi. Guru beliau yang terkenal mewariskan kealimannya adalah Syamduddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Marzuq. Dari tangan gurunya ini, imam Syatibi menjadi sosok ulama terkenal. Dalam biografi ulama-ulama, Beliau juga berguru kepada para cendikiawan di masanya.

B. Murid

Banyak dari ulama lahir melalui tangan Imam Syatibi. Mereka semua mengakui kealiman dan kecerdasan Imam Syatibi dalam menguasai ilmu dalam berbagai bidang. Diantara yang masyhur adalah:

- Abu Yahya bin Asim
- Abu Bakar bin Asim
- Abu Abdillah al-Bayani
- Abu Ja'far al-Qassar
- Abu Abdillah al-Majazi

C. Karya

Imam Syatibi pada dasarnya merupakan pakar dalam banyak disiplin keilmuan. Beliau memiliki karya terbukukan dan yang tidak terbukukan. Diantara karya beliau yang terbukukan adalah:

- *I'tisham Fi Ahlil Bida'i Wa Dlalati*
- *Muwafakat Fi Ushulil Fikh*
- *Al-Maqasid As-Syafiyah Fi Syarah Khalasah Al-Kafiyah (Syarah Alfiah Ibnu Malik)*
- *Al-Ifadat Wal Insyadat*

Sedang diantara beberapa karya beliau yang tidak terbukukan adalah:

- *Syarah Jalil Ala Al-Khulasah*
- *Kitabul Majalis (Syarah Bab Buyu' Sahih Bukhari)*
- *Unwanul Ittifaq Fi Ilmi Isytiqaq*
- *Kitab Usul An-Nawhu*
- *Madzhab Ahli Tasawwuf*⁴⁸

H. Pengaturan Poligami

Pengaturan mengenai poligami terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 3 Ayat (2) yang menentukan: “Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin Pengadilan Agama. Penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujuinya. Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang, namun hanya diatur sedemikian rupa agar

⁴⁸ As-Syatibi, *Muwafakat Tahqiq Masyhur Salman* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2002) H. 53

benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan hukum. UU Perkawinan sangat jelas mempersulit terjadinya poligami, sehingga memberikan pemahaman bahwa istri diangkat derajatnya agar tidak disemenakan oleh suami. Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim Pengadilan Agama. Di sisi lain terdapat dinamika terkait poligami diantara lain:

1. Alasan-alasan Dibolehkan Poligami

Alasan-alasan dibolehkannya poligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 4 Ayat (2), sebagai berikut :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan di atas disebut sebagai persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Mengacu pada tujuan pokok perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 (tiga) hal tersebut di atas jika menimpa 1 (satu) keluarga atau pasangan suami istri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan, meskipun hanya sebagian dari tujuan perkawinan, kebutuhan seksual akan mendatangkan

pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Begitu juga apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Berbeda dengan alasan ketiga, tidak semua pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang-kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Hal yang wajar dan masuk akal jika suami ingin berpoligami, karena keluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap⁴⁹.

Syarat dibolehkannya poligami menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), sebagai berikut:

- (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka⁵⁰.

KHI Pasal 56 menentukan syarat dibolehkan poligami, yaitu:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975);

⁴⁹ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat*. Cet VI Edisi Revisi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 170

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persyaratan di atas disebut persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami⁵¹. Artinya seorang suami yang berpoligami dituntut memiliki rasa tanggung jawab besar, dimana dirinya tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi juga kesemua istrinya. Seorang suami harus bisa membagi kewajibannya atas istrinya dengan mampu menghidupi dan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya dengan layak dan adil. Oleh karena itu seorang suami yang miskin dan tidak mendapat tempat dari hati istri-istrinya, sangat sulit untuk berpoligami.

Al-Hamdani mengatakan bahwa “keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara materil dan spiritual, lahiriah dan batiniah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang berpoligami. Sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang”.⁵² Pesan Hamdani ini menegaskan seorang yang berpoligami harus siap zahir batin baik secara finansial maupun mental dalam membangun rumah tangga besarnya dengan lebih dari satu istri. Suami yang terkendala secara finansial dan tidak memiliki kesiapan mental cenderung akan tidak tersandung dalam membangun bahtera rumah tangga.

⁵¹ Amir Nurruddin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam* (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI), 2004, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 164.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 118.

Agar syarat dalam UU Perkawinan lebih jelas maka perlu dikaitkan dengan prosedur poligami. Prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam BAB VIII PP No.9/1975 Pasal 40-45. Inti dari prosedur dibolehkannya poligami dalam PP No. 9/1975 Pasal 40-45 yaitu suami wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya alasan dan syarat dibolehkannya poligami, dengan memanggil dan mendengar pernyataan istri yang bersangkutan dengan waktu pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum adanya izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan hukum yang mengatur tentang prosedur poligami seperti yang telah diuraikan di atas, mengikat semua pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan, apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.

I. Poligami Siri

Poligami siri pada intinya merupakan serapan kata dari nikah siri yang artinya adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang mengharuskan adanya pencatatan oleh petugas pencatat perkawinan dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama. Dari makna tersebut tergambar bahwa poligami siri merupakan pernikahan seorang suami atas istri ke dua, tiga atau empat yang dilakukan tanpa dicatatkan dan atau tanpa mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengadilan Agama. Mudah-mudahan poligami siri adalah pernikahan yang tidak sesuai prosedur poligami dalam undang-undang perkawinan.⁵³

Istilah perkawinan siri jika dibawa dalam ranah fikih memiliki makna yang berbeda dimana pernikahan siri adalah upaya pembungkaman dari pihak suami istri atas saksi pernikahan agar peristiwa nikah yang terjadi tidak disampaikan kepada khalayak ramai. Dari definisi tersebut, memunculkan perbedaan pendapat terkait keabsahan nikah menurut empat mazhab. Sebagian menganggap sah dan sebagian lain tidak. Namun jika tidak sesuai prosedur administratif, secara fikih jika syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah.⁵⁴

Pernikahan siri lebih tepatnya pernikahan di bawah tangan pada prinsipnya hanya bermuara pada persoalan administratif tidak sampai mengarah pada esensi keabsahan nikah. Artinya pernikahan siri bisa dianggap sah secara hukum negara apabila para pihak terkait mengajukan pernikahan siri yang dilangsungkan agar diisbat oleh pengadilan agama setempat. Pengaturan isbat nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana muatan hukumnya bermaksud

⁵³ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal IUS Vol IV nomor 1 tahun April 2018 H. 128

⁵⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawainan Indonesia* (masalah-masalah krusial), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 25

untuk menjamin ketertiban umum, kemudahan hukum, kekuatan hukum serta instrumen hukum yang lain.⁵⁵

J. PERATURAN ISBAT NIKAH

1. Pernikahan harus dicatat

Isbat nikah pada dasarnya didasarkan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan pada pasal 2 berbunyi:

- a. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- b. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Begitupula dalam KHI pasal 4 dan 5 memiliki bunyi senada yang lebih spesifik:

- a. “Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.”
- b. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (“KUA”) bagi perkawinan pasangan Muslim.”

Guna menjabarkan maksud dari pencatatan perkawinan, KHI menguatkannya lagi dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 dan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

⁵⁵ Latifah Ratnawaty, *Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol 2 Nomor 2 tahun 2015 H. 12

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari bunyi undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum islam di atas pada dasarnya nikah memiliki dua sudut. Pertama nikah dianggap sah apabila telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama. Artinya rukun dan syarat nikah harus terpenuhi guna menentukan keabsahan nikah serta tidak ada *mani'* (penghalang) tidak sahnya nikah. Ke dua setiap pernikahan yang dilangsungkan harus dicatat oleh petugas KUA yang berwenang. Artinya kewajiban ini pada dasarnya berada di luar keabsahan nikah secara agama. Hanya nikah itu baru dianggap legal menurut hukum apabila dicatat oleh petugas KUA sehingga masing-masing suami istri berhak mendapatkan akta nikah. Dari sini kemudian muncul bukti otentik berupa surat resmi yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat nikah dimana dalam hal ini merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama.

Fungsi kenapa pernikahan harus dicatat adalah adalah guna mewujudkan ketertiban mengingat akibat dari perbuatan hukum perkawinan adalah menimbulkan hak dan kewajiban pada suami dan istri. Oleh karena

itu guna menjamin kemaslahatan pasangan suami istri, diharuskan adanya pencatatan perkawinan sehingga menjadi bukti otentik telah terjadinya perbuatan hukum. Apabila perkawinan dilakukan secara siri atau tidak melibatkan petugas pencatatan perkawinan, maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum sebab satu-satunya jalan pembuktian nikah adalah “akta nikah”. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri yang telah menikah namun tidak dicatatkan, mereka harus mengajukan isbat nikah guna mendapatkan payung hukum atau jaminan perlindungan hukum.

2. Prosedur Isbat Nikah

Isbat nikah adalah pengesahan oleh hakim Pengadilan Agama atas pernikahan yang telah dilakukan tanpa dihadiri pegawai pencatatan nikah guna mendapatkan payung hukum.⁵⁶ Ulasan lengkap terkait pengaturan isbat nikah diatur dalam Kompilasi hukum islam tahun 1991 pada pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 sebagaimana berikut:

- a. “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.
- b. “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

⁵⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*, Humanites Genius, Makkasar, 2020 H. 23

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Dari pemaparan pasal dan ayat dalam Kompilasi hukum islam tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan petugas pencatatat perkawinan dapat disahkan dengan cara isbat asalkan selama perkawinan itu berlangsung telah memenuhi syarat rukun serta tidak ada penghalang keabsahan nikah. Itu artinya isbat nikah pada dasarnya merupakan solusi dari keharusan pencatatan perkawinan dimana fungsinya adalah guna memberikan jaminan hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pengolahan kajian dalam penelitian ini menggunakan dasar-dasar penilitan yang dipetakan sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Kajian dalam penelitan ini merupakan kajian normatif atau kajian Pustaka yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber buku, jurnal dan lain-lain. Kajian ini berusaha menguak korelasi peraturan SEMA nomor 3 tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami siri dikupas dengan teori masalah mursalah untuk mendapatkan gambaran utuh apakah teks peraturan terkait didudukkan dengan prinsip maslahat telah menemukan sinergitas atau justru sebaliknya. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁵⁷. Penelitian hukum normatif dengan demikian adalah meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem atau peraturan yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Artinya, yang akan diteliti ialah konsistensi antara ketentuan yang diatur SEMA nomor 3 tahun 2018 dengan merujuk pada kajian masalah mursalah.

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta) 2010 halaman 34.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penelitian ini berangkat dari sebuah fakta yang kemudian diabstraksikan ke dalam kesimpulan dengan pandangan yang lebih umum. Kajian data merupakan inti dalam penelitian ini. Oleh karenanya validitas data dan usaha mengupas dan mengorelasikannya dengan data yang lain adalah kunci kesuksesan jenis penelitian ini⁵⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis Islam menggunakan teori Masalah Mursalah. Peneliti berusaha mencari tahu apakah keputusan sema nomor 3 tahun 2018 yang menetapkan tidak menerima perkara isbat nikah poligami siri telah sesuai dengan suara islam sesungguhnya atau tidak. Pendekatan komparatif akan sangat kental digunakan karena muatan isbat nikah poligami akan dikupas dengan maslahat mursalah dengan menelaah melalui sumber data yang berbasis pada al-Quran, Hadis, Ushul fikih dan kitab-kitab fikih.

3. Sumber Hukum

Kajian ini menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan yang dibagi menjadi dua sumber hukum, yaitu primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang berhubungan langsung dan menjadi pokok rujukan utama. Adapun Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan

⁵⁸ Mardalis, *Metode Penelitian dan Pendekatan Proposal* (Jakarta, Bina Aksara, 2008) h. 28

dalam bentuk bahan-bahan hukum⁵⁹. Adapun sumber hukum pada penelitian demikian dibagi sebagaimana berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber pokok dalam tesis ini adalah Sema nomor 3 tahun 2018 yang menjadi objek kajian lalu ditelaah menggunakan sumber utama dari literatur khazanah Islam seperti kitab-kitab yang membahas tentang teori masalah mursalah diantaranya:

- a. Al-Muwakafat; Syatibi
- b. Al-I'tisham; Syatibi
- c. Nadzariyatul Maqasid 'Inda Imam Syatibi; Raisuni
- d. As-Syatibi Wa Maqasidus Syariah; Humadi al-Ubaidi
- e. Al-Mustasfa; Ghazali
- f. Ilmu Usul Fikih; Abdul Wahab Khalaf
- g. Ushul Fikih Islami; Wahbah Zuhaili
- h. Maqasid Syariah: Tahir bin Asyur

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber data pendukung dalam penelitian adalah beberapa kitab tafsir al-Quran, Tafsir Hadis, Kaidah fikih dan kitab-kitab fikih dan ushul fikih lainnya yang pembahasannya memiliki tautan dengan tema yang dikaji berupa masalah isbat nikah poligami.

4. Teknik Pengumpulan informasi

⁵⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008) h. 119

Penelitian ini adalah studi analisis hukum dengan objek kajian berupa Sema nomor 3 tahun 2018 ditinjau teori Masalah Mursalah. Informasi yang dihimpun dalam penelitian ini adalah segala hal yang terkait dengan masalah isbat nikah dan poligami untuk dijadikan perbendaharaan demi memudahkan pengkajian sebagaimana disebutkan dalam sumber data. Metode yang digunakan adalah dokumentasi dengan mencari data-data terkait lalu menggunakan variable untuk diklasifikasikan pada setiap sub pembahasan demi menguak aspek-aspek kemaslahatan isbat nikah poligami siri. Peneliti berusaha mendeskripsikan dan meramu hasil informasi yang didapat guna menjadi bahan analisis kajian.

5. Metode Analisis Data:

Metode yang dipakai adalah metode Induktif dimana sebelumnya diulas terkait pentingnya isbat nikah dalam nikah siri lalu kemudian lebih dispesifikasikan ke dalam kasus isbat nikah poligami siri dengan menjadikan kacamata maslahat mursalah sebagai barometer. Pengkajian masalah dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa hal berikut:

a. Editing

Peneliti menghimpun data dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Data-data yang penting akan langsung masuk perbendaharaan

b. Klasifikasi

Peneliti akan memilah data-data yang telah diperoleh disesuaikan sub tema yang dikaji. Setiap syarat poligami akan disediakan data yang disesuaikan.

c. Verifikasi

Peneliti akan berusaha mengecek ulang apakah data yang diambil telah teruji dan layak dijadikan referensi. Setiap temuan data diusahakan tetap berdasarkan sumber yang memiliki kredibilitas

d. Analisis

Peneliti mengkaji setiap bahan yang telah disesuaikan dengan topic masing-masing kemudian dipadukan dan ditinjau dengan data dari masalah mursalah

e. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian panjang, peneliti berusaha menarik kongklusi pembahasan dengan mempertimbangkan setiap temuan yang didapat

6. Penelitian terdahulu

A. Mukhtaruddin Bahrum

PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI

Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli 2019: 194-213

Isbat nikah poligami siri berdampak positif dan negatif. Sisi positifnya, isbat nikah memberikan payung hukum atas mereka yang melakukan pernikahan siri sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) KHI. Sebab dengan adanya isbat

atas poligami siri, pasangan nikah siri berhak mendapatkan buku nikah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 KHI. Jaminan hukum yang dimaksud akan berdampak pada peningkatan status sosial istri kedua di masyarakat yang dulunya siri kini menjadi resmi. Selain itu perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami siri itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penghilangan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin. Olehnya itu, kedua sisi tersebut memiliki dasar argumentasi yang patut untuk diperhatikan.

B. Ahmad Cholid Fauzi (Fakultas Hukum Universitas Semarang)

**KEDUDUKAN HUKUM ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI Jurnal
USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Itsbat nikah poligami irri. Itsbat nikah poligami siri adalah permohonan penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan mengenai sahnyanya pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan secara siri tidak dicatatkan sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Jenis pendekatan tesis ini

adalah penelitian yuridis normatif artinya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in book). Hasil penelitian menunjukkan dikabulkannya permohonan itsbat nikah poligami siri dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. Putusan tersebut tergolong hukum materiil baru. Dengan demikian legal standing terhadap putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi, melalui isbat nikah poligami siri dari Pengadilan Agama Magetan, perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Adapun solusi terhadap putusan tersebut yaitu perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan itsbat nikah poligami siri, adanya penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi) dan prosedur izin poligami.

C. Robith Muti'ul Hakim, UIN Sunan Kalijaga. Tesis

ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI YURIDIS-NORMATIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT. G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN). (2017)

Hasil penelitian ini adalah bahwa secara Yuridis pada putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. Smn. Pengadilan menolak permohonan pemohon, dikarenakan suami tidak mendapat izin dari isteri pertama, dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menurut pertimbangan hakim keputusan itulah yang terbaik demi kemaslahatan. Sedangkan pada putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn. permohonan pemohon diterima karena terpenuhinya syarat-syarat perundang-undangan, yaitu mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya jaminan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) karena sudah menikah siri dan telah memiliki anak dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon isteri Pemohon secara resmi. Sedangkan secara normatif tidak ada nash yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin kepada seorang isteri ketika hendak berpoligami. Keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan maqasid syariah.

D. Armalina (IAIN Bengkulu) Tesis

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ISBAT NIKAH
ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ARGA
MAKMUR NOMOR: 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM DAN NOMOR:
0128/Pdt.P/2016/PA.AGM (2018)**

Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung oleh pembuktian pada fakta-

fakta dipersidangan. Maqasid syariah dalam perkara isbat nikah dalam hukum Islam yaitu untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia pada status perkawinan dan status anak dalam perkawinan. Penetapan isbat nikah memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara. Dengan demikian isbat nikah poligami lebih mendapatkan kemaslahatan.

Tabel: Ringkasan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

no	Nama peneliti Judul dan tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinilas penelitian
1.	Mukhtaruddin Bahrum: <i>Problematika Isbat Nikah Poligami Siri.</i> 2019	Membahas tentang implementasi Isbat nikah poligami	Tidak mengkaji terkait penutupan isbat poligami dalam SEMA nomor 3 tahun 2018	Mengkaji isbat nikah poligami siri analisis atas SEMA nomor 3 tahun 2018
2.	Ahmad Cholid Fauzi Magister (Hukum Universitas Semarang) Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018	Membahas tentang isbat nikah poligami siri	Tidak mengkaji terkait penutupan isbat poligami dalam SEMA nomor 3 tahun 2018	Mengkaji isbat nikah poligami siri analisis atas SEMA nomor 3 tahun 2018
3.	Robith Muti'ul Hakim (UIN Sunan Kalijaga) Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi	Membahas tentang isbat nikah poligami siri	Tidak mengkaji terkait penutupan isbat	Mengkaji isbat nikah poligami siri analisis atas SEMA

	Terhadap Putusan No. 190/pdt. g/2004/pa. smn. dan putusan no. 1512/pdt.g/2015/pa.smn. tentang isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman). (2017)		poligami dalam SEMA nomor 3 tahun 2018	nomor 3 tahun 2018
4.	Armalina (iain bengkulu) tesis Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0110/pdt.p/2016/pa.agm dan nomor: 0128/pdt.p/2016/pa.agm (2018)	Membahas tentang isbat nikah poligami siri	Tidak mengkaji terkait penutupan isbat poligami dalam SEMA nomor 3 tahun 2018	Mengkaji isbat nikah poligami siri analisis atas SEMA nomor 3 tahun 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Problematika Poligami Siri Atas Perempuan

Praha poligami siri atas perempuan yang dinikahi siri aspeknya begitu beragam dan risikonya berpeluang terjadi di banyak hal. Mengingat potensi dampak negative cukup bervariasi, peneliti berusaha membedahnya ke dalam beberapa aspek agar tersusun rapi dan dipahami bahwa problem poligami siri benar-benar gawat. Untuk itu berikut dipaparkan telaahnya disesuaikan dengan aspek-aspek terkait;

1. Problem secara hukum positif

Pada prinsipnya seluruh pernikahan harus dicatatkan oleh pihak petugas pencatatan perkawinan sebagaimana amanat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang dalam hal ini ditugaskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jika perkawinan itu dilakukan secara siri atau di bawah tangan konsekuensinya adalah tidak memiliki ketetapan hukum sehingga di mata Negara belum dianggap sebagai suami istri yang sah. Lebih jauh lagi, jika terjadi urusan-urusan dalam rumah tangga suami istri tersebut, maka Negara tidak bisa hadir dan berperan lebih jauh sebelum perkawinan itu diisbat atau ditetapkan ke Pengadilan Agama. Mengingat pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak diakui Negara.⁶⁰

⁶⁰ Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum Adil Vol. 8 No. 1 H. 80

Problematikanya akan lebih serius dan semakin rumit dikala pernikahan siri tersebut dilakukan dalam rangka poligami, dimana secara prosedural mestinya pihak-pihak yang berpoligami harus mendapatkan legalitas izin dari Pengadilan Agama sesuai amanat Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 1. Sebab dalam kasus poligami siri, Negara benar-benar tidak bisa hadir dan dapat membantu lebih jauh apabila terjadi perlisihan atau terjadi dampak negatif lainnya dikarenakan pintu isbat nikah telah ditutup setelah dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai penegas larangan memproses perkara isbat nikah poligami. Hal ini tentu berbeda dengan pernikahan siri non poligami yang mana Negara masih bisa membantu dengan disahkan terlebih dahulu melalui jalur isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁶¹

Konsekuensi logis dari ketidak wenangan hakim Pengadilan Agama menangani poligami siri berdampak atas tidak adanya kesempatan perempuan mendapatkan pengesahan atas poligami siri yang dilakukannya. Risiko terbesarnya adalah perempuan tidak mendapatkan payung hukum yang menjamin kehidupannya sehingga riskan terpapar beragam kesulitan dan dampak negatif lainnya. Pasalnya Negara enggan mengakui perempuan tersebut sebagai istri sah karena dilakukan di bawah tangan dan tanpa legalitas izin Pengadilan Agama. Negara juga tidak dapat mengakui pernikahannya dengan

⁶¹ Mukhtaruddin Bahrum: *Problematika Isbat Nikah Poligami Siri*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 2019 h. 197

cara isbat nikah mengingat hal demikian tidak bisa diproses sebab bukan termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁶²

Penjelasan di atas memberi gambaran tegas bahwa perempuan menemui jalan buntu guna mendapatkan legalitas pernikahannya. Sebab meskipun perempuan sekaligus suami dan istri pertamanya mengajukan perkara permohonan isbat nikah secara voluntir yang menunjukkan bahwa keluarga mereka siap berpoligami dan istri pertama rela dimadu tetap saja hakim harus menolaknya di sidang pertama karena dianggap cacat formil. Mengingat Pengadilan Agama tidak berwenang menangani kasus demikian atau dalam istilah hukum disebut *obscuur libel, ne bis in idem* yang artinya cacat karena melanggar yuridiksi baik bersifat kompetensi absolut atau relative yang berujung hakim harus menjatuhkan putusan NO.⁶³

Menariknya, Kendati pernikahan poligami siri tidak bisa diisbat, bukan berarti disimpulkan bahwa Negara tidak menganggapnya sebagai perkawinan yang sah. Hal ini didasarkan atas fakta hukum bahwa Negara memberi solusi dan jalan keluar untuk anak yang dihasilkan dari poligami siri bisa mendapatkan legalitas nasab kepada ayahnya dengan melakukan pengajuan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Itu artinya secara tidak langsung Negara mengakui perkawinan poligami siri sebagai perkawinan yang sah. Sebab jika tidak demikian, niscaya anak tersebut tidak dapat diajukan asal usul nasabnya persis sebagaimana tidak bisa diajukannya asal usul anak atas hubungan di luar nikah

⁶² Achmad Kholid Fauzi, *Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri*, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018 H. 103

⁶³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016) H. 811

kepada ayah biologisnya. Menimbang asal usul anak hanya bisa ditetapkan dari perkawinan yang sah bukan yang lain.⁶⁴

Adanya solusi atas anak dengan bisa mengajukan nasab sedangkan pada istri tidak bisa mengajukan isbat nikah ditenggarai atas keterlibatan perempuan dalam menentukan kesediaannya dinikah poligami siri. Anak yang dilahirkan dari poligami siri tidak ikut campur dalam mengambil keputusan menikah poligami siri. Oleh karena itu anak tidak dilibatkan dalam memikul kesalahan hukum yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kesediaan istri dipoligami siri itulah yang menyebabkannya harus siap memikul risiko besar atas keberanian pengambilan keputusan tersebut. Sejatinya perempuan bisa memiliki pilihan dinikahi dengan prosedur hukum yang sah. Ketika dia memilih bersedia dinikahi tidak sesuai prosedur hukum maka dia harus siap menanggung segala dampak negatifnya. Hal demikian tidak berlaku bagi anaknya.

Di sisi lain praktek poligami siri juga dapat berujung pidana. Hal ini didasarkan atas fakta beberapa kasus yang menyeret pelaku poligami siri dikebloskan ke dalam bui. Poligami siri dianggap telah melanggar pasal 280 KUH Pidana yang menerangkan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan istri pertama dapat dipidana paling lama lima tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 45 dan 49 ditemukan hal serupa bahwa poligami tanpa izin istri adalah sebuah bentuk kriminal. Artinya tidak menutup kemungkinan para

⁶⁴ Fitria Oliva, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014 H. 141

pelaku poligami siri diseret ke meja hijau atas laporan telah melakukan tindak pidana pernikahan gelap. Meskipun hal demikian juga masih menjadi bahan kajian beberapa hakim dan akademisi hukum, namun fakta yurisprudensi yang menjatuhkan hukuman pidana atas pelaku poligami siri tidak bisa dibantah dan telah menjadi peristiwa hukum.⁶⁵

Perempuan yang dipoligami siri tidak menutup kemungkinan dirinya juga dikenai hukuman tuduhan perzinaan sesuai pasal 284 KUH Pidana. Sebab pasal perzinaan hanya menyaratkan salah satu dari laki-laki atau perempuan yang berhubungan di luar pernikahan berstatus suami atau istri orang lain. Pasal tersebut tidak menyaratkan keduanya harus berstatus suami atau istri orang lain. Walaupun hubungan itu didasarkan atas pernikahan poligami siri. Mengingat substansi hukum berdasarkan terminologi undang-undang bahwa pernikahan poligami itu baru dianggap sah apabila dicatatkan dan mendapatkan izin dari hakim Pengadilan Agama.⁶⁶

Berdasarkan fakta hukum yang berlaku. Secara tidak langsung poligami siri melanggar dua pasal prosedural undang-undang perkawinan dan bisa dikenai pasal pidana. Dua pasal prosedural tersebut adalah pasal 2 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan pernikahan dan pasal 4 Undang-undang serupa yang mewajibkan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama agama. Adapun pasal pidana yang mengintai pasangan

⁶⁵ Muhammad Yusuf Siregar, *Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 5 Maret nomor 1 2017 H. 67

⁶⁶ H. Saubari, Jerat Pidana Nikah Siri, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/694/Jerat-Pidana-Nikah-Siri> diakses pada tanggal 12-03-2021

poligami adalah pasal 298 atau 230 KUH Pidana yang mengancam pelakunya dipidana kurungan selama lima tahun. Bahkan pidana bisa terjadi terhadap perempuan yang dipoligami siri dengan tuduhan melakukan tindakan perzinahan.

Konsekuensi logis dari poligami siri yang melawan hukum tersebut adalah tidak diberikannya jalan isbat nikah, mengingat kesalahan yang dilakukan cukup fatal. Penutupan isbat nikah berbuntut merugikan perempuan. Pasalnya, perempuan benar-benar menghadapi jalan buntu atas statusnya sebagai istri. Perempuan tidak mendapati solusi yang sah guna mendapatkan jaminan payung hukum. Perempuan poligami siri akan serba repot. Melepaskan statusnya tidak bisa pun mendapatkan pengakuan juga tidak bisa. Istilahnya maju mundur pun kena getahnya. Dengan demikian secara tidak langsung larangan isbat nikah poligami dalam Sema nomor 3 tahun 2018 meskipun mengandung masalah namun di sisi lain justru merugikan perempuan. Sebab jangankan disahkan, diproses secara hukum pernikahan poligami itu sudah tidak bisa.

2. Problem atas hak perempuan sebagai warga negara

Perempuan yang berstatus sebagai istri akan mendapatkan perlindungan hukum jika statusnya sebagai istri diakui oleh Negara. Sebaliknya perempuan yang tidak mendapat legalitas pengakuan Negara atas statusnya sebagai istri disebabkan pernikahan siri atau dilakukan di bawah tangan akan menerima efek berantai atas jaminan kehidupannya, khususnya dalam status sebagai warga Negara atau sebagai istri. Korelasinya Negara tidak bisa ikut campur lebih jauh

atas perempuan yang bersedia berpoligami apabila terjadi kerugian-kerugian yang bersifat material atau immaterial. Perempuan harus menanggung sendiri risiko atas tindakannya tersebut. Mengingat pengakuan sebagai suami istri oleh Negara hanya apabila dapat dibuktikan dengan akta pernikahan yang sah. Sementara dalam kasus demikian faktanya berbicara lain dimana pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum tetap.⁶⁷

Hal yang paling mencolok adalah perempuan yang dipoligami tidak bisa mengakses layanan publik seperti mendapatkan kartu keluarga, perubahan status dalam kartu tanda penduduk, pengurusan passport dan hal-hal lain yang bersifat dokumen kependudukan yang pada akhirnya akan merepotkan perempuan itu sendiri. Demikian ini penting dipertimbangkan sebab dokumen kependudukan merupakan syarat mutlak seseorang dapat mengurus berbagai hal menyangkut kepentingannya. Pasalnya berbagai hal meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan hal lain yang berbasis atas kenegaraan harus disertai dengan dokumen kependudukan. Artinya perempuan yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan akibat poligami siri secara tidak langsung akan juga berdampak atas hal-hal lain yang berupa jaminan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan fasilitas layanan publik lainnya.⁶⁸

Hal ini menjadi bukti bahwa problematika poligami siri bukan hanya bicara atas hak perempuan sebagai istri. Tapi juga menyeret hak perempuan sebagai

⁶⁷ Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Kartha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019 H. 233

⁶⁸ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015 H. 25

warga Negara dimana hal ini dapat berujung atas kesulitan mengakses layanan publik akibat tersendat prosedural dokumen. Berapa banyak instansi baik pemerintahan maupun swasta yang menggunakan kartu keluarga maupun dokumen lain sebagai persyaratan. Padahal perempuan yang berstatus istri, kartu keluarganya harus mengekor kepada suaminya. Belum lagi terkait dokumen kependudukan lainnya. Dari sini tergambar bahwa poligami siri berdampak negatif atas hak perempuan secara umum sebagai warga Negara dan mengusik haknya sebagai istri secara khusus.

3. Problem hak perempuan sebagai Istri

Poligami siri berdampak atas hak perempuan sebagai istri adalah keniscayaan. Pertama hak istri dalam hal menerima nafkah baik primer, tersier dan sekunder. Poligami siri tidak memberikan jaminan perlindungan hukum atas perempuan terkait hak nafkah. Oleh karena itu jika suami tiba-tiba pergi menghilang atau enggan memberi nafkah, maka istri tidak bisa menuntutnya melalui jalur hukum. Sebab secara hukum administrasi Negara, perempuan tersebut statusnya tidak dianggap sebagai seorang 'istri'. Akibatnya perempuan yang bersangkutan harus hidup menderita terjerat oleh status istri padahal realitanya, dirinya tidak ada yang menafkahi pun tidak bisa meminta pertolongan melalui jalur hukum guna mengatasi masalahnya. Padahal secara prinsip, pengabaian hak istri adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Istri pun juga tidak bisa menuntut hak-haknya melalui Undang-undang tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004 nomor 23 mengingat dirinya tidak memiliki bukti otentik berupa akta pernikahan.⁶⁹

Problem ke dua adalah soal warisan. Ketika istri yang dipoligami siri ditinggal mati suaminya maka hal ini sangat riskan terkait haknya mendapatkan warisan. Bisa jadi kehadiran istri yang dipoligami siri tidak dianggap oleh keluarga suaminya sehingga dia disingkirkan dari menerima hak waris. Perempuan yang bersangkutan juga tidak bisa menuntut haknya melalui jalur hukum akibat secara materil statusnya tidak dianggap sebagai istri sah dari suami yang meninggal tersebut. Pihak yang menghalangi perempuan bersangkutan mendapat warisan juga tidak bisa dituntut dan dihukum karena fakta hukum cenderung mendukung pihak yang menghalangi.⁷⁰

Hal yang lebih menyedihkan bahwa perempuan yang dipoligami siri berpeluang besar tidak diperlakukan adil. Padahal syarat mutlak suami yang berpoligami adalah berlaku adil dalam urusan nafkah, pembagian waktu bersama dan pergaulan yang baik. Suami harus berlaku adil dalam besaran nafkah yang diberikan kepada istri-istrinya meliputi nafkah tempat tinggal, makan, pakaian dan pelengkap lainnya. Artinya suami bisa jadi memperlakukan istri poligami siri seenak hatinya dengan memberi bagian kecil kepada istri tersebut tanpa peduli dengan yang namanya berlaku adil. Bisa jadi perempuan yang dipoligami siri juga mendapatkan kesenjangan dalam pembagian waktu dan bagaimana

⁶⁹ Erniati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015 : 223

⁷⁰ Asman, *Konsep Keadilan Dalam Poligami*, Jurnal al-Maslahah: Volume 15 Nomor 1 Juni 2019 H. 36

suaminya memperlakukannya.⁷¹ Mengingat dengan tidak adanya payung hukum Negara yang melindungi perempuan, dengan mudahnya suami bisa tidak berprilaku adil dan berprilaku manusiawi tanpa pernah takut dituntut atau dihukum akibat mengabaikan istri poligaminya tersebut. Suami secara bebas bisa memperlakukan istri yang dipoligami siri ibarat perempuan simpanan yang dikunjunginya dalam waktu tertentu dan diperlakukannya seperti orang lain yang harus sembunyi-sembunyi khawatir terciduk di muka umum.

4. Problem atas status 'Istri'

Sengkarut poligami siri tidak hanya berhenti atas hak perempuan sebagai warga Negara maupun haknya sebagai istri. Lebih lanjut perempuan yang dipoligami, memiliki potensi besar tidak bisa menyudahi statusnya sebagai istri bilamana sang suaminya pergi tanpa kabar jelas atau membiarkannya hidup terlunta-lunta. Secara hukum agama maupun positif, perempuan tidak dapat menceraikan dirinya sendiri. Perceraian hanya bisa dilakukan oleh suami atau hakim di Pengadilan Agama. Dalam hal istri sudah terpojokkan akibat suami enggan menceraikan padahal istri sudah sangat merana, dia tidak bisa melakukan apapun. Memohon suaminya menjatuhkan talak sudah tidak peduli, Di satu sisi dia juga tidak bisa meminta pertolongan dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama akibat pernikahannya tidak diakui secara administrasi Negara.

⁷¹ Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, AN NISA'A, VOL. 8, NO. 1, JUNI 2013 54

Akibatnya sang perempuan tidak bisa menikah lagi dengan siapapun karena statusnya masih sebagai istri sah orang lain secara agama. Jika dipaksakan menikah, bisa jadi pernikahan itu tidak sah dan hubungannya dianggap sebagai perzinahan di mata agama. Oleh karena itu poligami siri benar-benar mencekik perempuan. Poligami siri berbahaya karena perempuan berpotensi hidup dengan terjerat membawa status istri tanpa bisa melepaskannya, Demikian pula menikah dengan orang lain yang siap bertanggung jawab atas dirinya. Mengingat pengajuan isbat nikah pada pasal 7 KHI disebutkan bahwa salah satu tujuan isbat nikah salah satunya adalah sebab adanya perkawinan dalam rangka perceraian.⁷²

5. Problem Sosial

Secara sosial, stigma negatif poligami tidak bisa dipungkiri. Perempuan yang dijadikan istri ke dua, ketiga atau keempat harus siap menanggung risiko menjadi bahan gunjingan dan penilaian negatif publik. Mental perempuan harus matang dan bulat ketika memutuskan bersedia berpoligami karena poligami menjadi topik yang hangat dalam perbincangan konsumsi publik. Masalahnya ketika perempuan dipoligami dengan jalur siri maka risiko yang diterima menjadi berlipat ganda. Perempuan tersebut dianggap sebagai istri simpanan, perebut suami orang dan label negatif lainnya. Mental yang harus disiapkan juga harus benar-benar kokoh. Sebab jika perempuan dipoligami siri tidak siap

⁷² Gema Mahardhika, *Fungsi Isbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 7 No. 1 Mei Tahun 2018 H. 16

mental, risikonya dia bisa tersakiti secara fisik dan psikisnya yang hal ini dapat berujung atas kematian hati nuraninya.

6. Problem dalam rumah tangga

Kehadiran istri ke dua, ke tiga dan ke tiga merupakan sumbu konflik internal rumah tangga. Menagemen poligami cukup sulit sebab laki-laki harus bijak dan bersikap adil atas istri-istrinya. Meski demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perseteruan dan perselisihan atas sesama istri. Masing-masing istri akan berkompetisi mendapatkan pengaruh suaminya. Berusaha agar pribadinya yang lebih diutamakan dengan mengesampingkan istrinya yang lain. Kompetisi demikian cukup adil jika masing-masing status istri adalah sah secara agama dan Negara. Masalahnya dalam hal istri poligami siri sudah kalah sejak awal sebab diperlakukan semena-mena ketika dinikahi. Istri poligami siri sudah terdiskreditkan dengan pernikahan sirinya. Kehadirannya sudah termarginalkan sejak awal sehingga dimaklumi jika dia akan dipandang sinis oleh istri pertama, kedua, ketiga bahkan oleh suaminya. Tentu prahara rumah tangga demikian sudah pasti membebani pemain baru apalagi dimasukkan dengan cara yang tidak sehat.⁷³

B. Larangan Isbat Nikah Poligami Perspektif Maslahat Mursalah

Kepentingan perempuan yang dipoligami siri ditinjau dari maslahat mursalah Syatibi menduduki posisi antara *dlaruri* atau *hajiyyat*. Dengan kata lain perempuan

⁷³ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016 H. 228

ketika terlantar akibat tidak dinafkahi oleh suaminya sebab tidak memiliki payung hukum yang jelas sehingga berdampak atas keberlangsungan hidupnya tergolong mudarat dalam level paling atas. Padahal perempuan tersebut harus diberi ruang dan solusi guna mengatasi problem serius yang merundungnya. Alasan utamanya adalah tidak dipungkiri bahwa poligami siri berbuntut menyebabkan hal-hal negatif sebagaimana di atas. Dalam hal nikah siri non poligami, perempuan diberi kesempatan isbat nikah sebagai bentuk upaya perlindungan dan penjaminan. Sayangnya dalam hal nikah siri poligami siri, kesempatan tersebut ditutup padahal risikonya jauh lebih besar.

Maslahat Mursalah menurut as-Syatibi pada hakikatnya berfungsi sebagai media (wasail) jika dinisbatkan kepada *dlaruri* dan berfungsi sebagai *takhfif* (peringanan) jika dinisbatkan kepada *hajiyyat*.⁷⁴ Secara tidak langsung isbat nikah mengandung masalah mursalah sebab dengan dibukakannya pintu isbat nikah poligami siri menjadi penjamin atas unsur primer (*dlaruri*) perempuan sekaligus menjadi hal yang meringankan dalam menjangkau urusan tersier (*hajiyyat*).

Isbat nikah poligami siri secara rinci memang tidak diatur dalam al-Quran maupun hadis, namun secara prinsip isbat nikah merupakan upaya perlindungan atas keluarga khususnya dari adanya marabahaya yang kapanpun dapat mengancam. Prinsip tidak boleh ada mudlarat yang menimpa seseorang marabahaya dalam sumber hukum islam. Dengan demikian korelasi isbat nikah menemukan titik terang jika disandingkan dengan masalah mursalah. Pasalnya

⁷⁴ Syatibi, al-I'tisham juz 3 h. 35

maslahat mursalah merupakan maslahat yang memang tidak diakomodir secara tekstual kasuisitik oleh al-Quran hadis namun memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip universal sumber hukum islam.⁷⁵

A. Implementasi Syarat Maslahat Mursalah Syatibi

Maslahat mursalah Syatibi lebih relevan digunakan sebagai analisis dari pada maslahat mursalah Ghazali sebab kajian Syatibi lebih umum yang bukan hanya ruang *dlaruri* yang bisa dibedah menggunakan maslahat namun ruang *hajiyyat* juga bisa ditelaah dan diaplikasikan menggunakan maslahat mursalah. Oleh karena itu secara fakta empiris, maslahat mursalah Syatibi lebih melihat kasus Isbat dengan kacamata lebar dan analisis yang lebih detail karena aspek yang diriset cukup luas. Walhasil terdapat beberapa persyaratan maslahat mursalah bisa dijadikan acuan yang dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Sesuai dengan maqasid syariat

Artinya maslahat mursalah tidak bertentangan dengan dalil spesifik al-Quran maupun hadis. Jika didasarkan atas telaah Isbat nikah poligami ditemukan bahwa secara hukum agama maupun positif mengakui bahwa pernikahan poligami siri adalah sah di mata agama. Hal ini bisa dibuktikan dengan disahkannya pengajuan asal usul anak yang lahir dari pernikahan poligami siri. Implikasi pengesahan tersebut adalah penetapan nasab anak kepada ayah kandungnya sehingga memiliki beraneka ragam dampak hukum seperti nafkah, waris dan lain-lain. Dari sini tentu aneh bila secara

⁷⁵ Mukhtasar Kitab al-I'tisham Juz 1 H. 100

hakikat nikah poligami siri itu sah dan hanya anak yang bisa mengakses efek hukum sah tersebut, sedang istri tidak. Padahal risiko dari dampak poligami siri secara sama mengintai mereka berdua.

Membuka pintu isbat poligami tidak bertentangan dengan sumber hukum tekstual spesifik (dalil *tafshili*) al-Quran hadis.⁷⁶ Sebab tidak ada teks yang melarang isbat nikah. Jika didasarkan atas fakta bahwa isbat nikah poligami merupakan lagalisasi atas tindakan yang melanggar hukum sebagaimana latar belakang ditutupnya pintu isbat poligami, secara esensi kurang tepat. Mustinya dipahami bahwa isbat nikah poligami merupakan pertaubatan dari kesalahan yang dilakukan pasutri poligami. Adapun apakah pertaubatan itu dikabulkan atau tidak, semuanya bergantung atas penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Setidaknya pasangan suami istri yang bersedia melangkah ke Pengadilan Agama guna mencari solusi atas masalah poligami merupakan langkah yang tepat daripada tetap diam menjalin hubungan yang tidak sah menurut Negara. Artinya yang maslahat justru pengajuan isbat poligami diberi kesempatan agar masing-masing bisa menemukan titik terang atas nasib pernikahan mereka.

Hadirnya pasutri poligami siri ke Pengadilan Agama setidaknya juga mendapatkan gambaran langkah dan tindakan apa saja yang harus diambil sesuai petunjuk pertimbangan hakim. Artinya hakim bisa memberi saran dan membenahi bagaimana berpoligami yang sesuai syariat dan prosedur

⁷⁶ Syatibi, al-I'tisham Juz 3 H. 35

administrasi Negara sehingga pasangan tersebut mendapatkan solusi hukum. Mengingat tidak semua masyarakat Indonesia paham terkait aturan dan sistem hukum yang berjalan. Banyak dari mereka yang masih awam dan butuh bimbingan. Poligami siri memang sebuah kesalahan. Namun dengan tetap membiarkannya pun juga salah. Sebaiknya hal demikian lekas dirujuk ke ranah hukum guna mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan tingkat kebutuhan para pencari keadilan.⁷⁷

2. Kasus yang dijadikan acuan masalah bersifat rasional

Secara prinsip, isbat nikah merupakan kasus yang rasional karena terlepas dari unsur ubudiyah yang didominasi atas prinsip dogmatis (*taabbudi*) yang mayoritas irasional. Syarat ke dua ini hendak menjelaskan bahwa masalah kasus harus benar-benar memiliki koherensi dengan nalar pikir manusia.⁷⁸ Letak rasionalitas ulasan isbat nikah poligami terletak pada perempuan yang tidak bisa melepaskan status sebagai istri kecuali atas keputusan suami atau hakim. Artinya perempuan poligami siri secara hukum tidak bisa menanggalkan statusnya sebagai istri dan juga tidak bisa mengupayakan agar status istri tersebut dapat disahkan. Menanggalkannya harus atas keputusan suami. Sedangkan jika suami tidak bertanggungjawab pergi meninggalkan, maka kesempatannya hanya kepada hakim. Sayangnya larangan isbat nikah dalam SEMA menutup pintu perempuan poligami siri bisa melepaskan statusnya tersebut. Oleh karena itu dalam kondisi seperti

⁷⁷ Addin Daniar Syahdan, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019) H. 452

⁷⁸ Syatibi, *al-I'tisham* Juz 3 H. 35

ini perempuan sangat terdiskreditkan, sebab dirinya menyandang status sebagai istri namun tidak ada yang mengayomi.

Dampak buruk ke dua atas penutupan pintu poligami secara total adalah hilangnya perempuan mendapatkan hak-haknya sebagai istri meliputi nafkah dan hak warisnya. Tatkala suami meninggal, jika perempuan tidak diakui administrasi Negara sebagai istri sah lantaran pernikahan poligami siri, akibatnya perempuan bersangkutan tidak dapat menerima waris dan dia tidak bisa menuntut haknya. Adapun anak yang lahir dari perkawinan poligami siri masih bisa mendapat hak warisnya setelah mendapatkan keputusan asal usul anak melalui Pengadilan Agama. Itu artinya terjadi kesenjangan hukum jika melihat konteks kasus demikian. Parahnya dengan tanpa adanya payung hukum terhadap perempuan poligami siri bisa jadi hak nafkahnya disepelekan sehingga menjadi mudlarat atas kehidupannya.⁷⁹

3. Maslahat mursalah kembali pada urusan dlaruri atau hajiyat.

Implementasi syarat ini begitu relevan dengan buka tutupnya isbat nikah. Sebab jika ditelaah lebih jauh bahwa pada dasarnya pelarangan isbat poligami dalam satu sisi memiliki nilai positif, namun di sisi lain juga berdampak negatif. Sebab Konsekuensi logis dari dilarangnya isbat nikah poligami berdampak signifikan memberi mudlarat atas perempuan sebagaimana diuraikan di atas. Dalam kaidah disebutkan bahwa menghindari mafsadah

⁷⁹ Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017 H. 12

lebih diprioritaskan daripada mengunduh masalah. Itu artinya poros hukum dibangun atas pola pikir mengesampingkan yang mafsadah terlebih dahulu baru memikirkan yang maslahat. Sedang dalam kasus menutup pintu isbat poligami justru terbalik. Cenderung mengutamakan mengunduh maslahat daripada menolak mafsadah.

Unsur *dlaruri* dan *hajiyyat* dalam hal ini adalah nasib perempuan yang terjat poligami siri sedang suaminya sudah enggan bertanggungjawab. Lantas bagaimana perempuan tersebut bisa mendapatkan hak-haknya. Padahal secara konsep fikih, apabila istri telah patuh kepada suami namun suami tersebut enggan menafkahi atau tidak bertanggungjawab dalam hak pernikahan, maka istri tersebut bisa mengajukan persoalannya kepada hakim. Kemudian hakim memanggil suami terkait guna memaksa suami bersangkutan menunaikan hak-hak istrinya. Lagi-lagi sayangnya dalam hal ini, perempuan tidak bisa menuntut haknya kepada hakim akibat pintu isbat poligami yang sudah ditutup.

Penutupan isbat poligami secara langsung berdampak atas hilangnya akses perempuan mengurus hak-haknya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan perempuan, dimana kementerian pemberdayaan perempuan dan anak mendefinisikannya sebagai segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis

yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.⁸⁰ Secara tidak langsung perlindungan perempuan adalah upaya memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak yang mestinya diperoleh sekaligus menghindarkan perempuan dari adanya tindak diskriminasi, ancaman dan penyelewangan baik perempuan dalam ruang lingkup sebagai istri, pekerja maupun status lainnya. Penjaminan perlindungan bisa ditempuh melalui jalur perlindungan hukum seperti mengatur kembali regulasi terkait hak-hak perempuan dan upaya pencegahan diskriminatif. Bisa pula ditempuh melalui upaya non hukum seperti melakukan agenda sosialisasi, kampanye dan menggunakan jejaring media.⁸¹

B. Jalan Tengah Isbat Nikah Poligami

Hal yang paling krusial terkait isbat poligami dimana hadirnya SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai klimaks bahwa isbat poligami siri bukan kewenangan Pengadilan Agama. Hanya saja peraturan SEMA nomor 3 tahun 2018 tersebut menurut Cik Basir selayaknya dibaca umum. Artinya larangan tersebut benar adanya jika dilihat dari aspek global. Namun tidak berlaku pada aspek kasuistik⁸². Hakim menurut Cik Basir diperbolehkan menangani kasus-kasus isbat poligami jika dirasa hal itu penting dan membuahkan maslahat setelah menimbang dari riwayat isbat yang diajukan. Apabila alasan-alasan yang diajukan tidak substantif

⁸⁰<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P#:~:text=Perlindungan%20perempuan%20a%20dalam%20segala%20upaya,ditujukan%20untuk%20mencapai%20kesetaraan%20gender.>

Diakses pada tanggal 18 April 2021

⁸¹ A. Reni Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi*, MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 2, Juni 2014, Halaman 203

⁸² Cik Basir, *Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama* H. 16

maka hakim bisa merujuk pada SEMA nomor 3 tahun 2018 dan menjatuhkan putusan NO.

Cik Basir secara tidak langsung berpandangan bahwa isbat nikah pada hakikatnya adalah kepentingan para pencari keadilan. Kepentingan itu perlu diakomodir apabila memang membawa maslahat bagi para pihak. Mengingat latar belakang isbat nikah dimotori beragam alasan dan kepentingan. Sedang SEMA nomor 3 tahun 2018 tidak menyingung latar belakang penutupan pintu isbat nikah. Oleh karena itu lebih bijaknya hakim melihat kasuistik terlebih dahulu kemudian baru menentukan langkah tepat mana yang diambil apakah memberi peluang perkara isbat nikah diproses hukum dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada atau memberi putusan NO berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 jika dirasa pengajuan isbat poligami tidak substantif.

Jalan tengah yang diambil Cik Basri menarik untuk dikaji dalam persoalan isbat nikah poligami. Pasalnya dalam kasus permohonan isbat nikah biasa terdapat alasan guna sang istri dapat bercerai dengan suaminya. Mengingat istri tidak bisa menceraikan dirinya sendiri. Setelah istri mendapat pengakuan atas pernikahannya lalu dia bisa mengajukan gugat cerai sehingga hilang status ‘istri’ yang melekat pada dirinya. Perempuan yang bersangkutan kemudian bisa menikah dengan laki-laki lain yang bertanggungjawab secara sah. Dalam kasus isbat nikah poligami, jika isbat tersebut ditutup total tanpa mengakomodir kepentingan perempuan. Lantas bagaimana perempuan bisa bercerai?. Sedang suami tidak memperdulikan

kehidupannya dan hakim enggan memprosesnya. Demikian ini merupakan dampak buruk pertama akibat jika isbat poligami diterjemahkan ditutup secara totalitas.

Alasan bahwa poligami yang dikhawatirkan semakin marak terjadi di masyarakat apabila isbat poligami diperbolehkan harus dikaji ulang. Sebab faktor meningkatnya poligami yang paling utama bukan pada boleh tidaknya isbat poligami sehingga menaikkan secara drastis angka poligami. Namun kembali pada individu masyarakat masing-masing. Poligami bisa didorong oleh hasrat seorang laki-laki, bisa juga dimotori oleh kepentingan seperti membutuhkan anak, istri tidak bisa memenuhi kewajibannya dan lain sebagainya. Dibuka tutupnya pintu isbat nikah poligami tidak akan berpengaruh signifikan atas niatan seseorang berpoligami. Menimbang selama masyarakat masih berpedoman bahwa hukum positif bukan penentu keabsahan nikah, maka selama itulah mereka mendudukan prosedur poligami sebagai syarat administratif belaka.⁸³

C. Isbat Nikah Hal Yang Maslahat Bagi Perempuan

Larangan isbat nikah meski di satu sisi mengandung maslahat namun di sisi lain mengandung madlarat terhadap perempuan. Adapun aspek maslahat di sini ditinjau dari segi komunal atau dilihat secara global. Sedang aspek madlarat di sini lebih cenderung di lihat pada individu perempuan. Oleh karena itu mestinya aspek individual berlaku pengecualian atas aspek komunal sehingga dalam hal ini isbat nikah mustinya diperbolehkan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-undang

⁸³ Jurairi Tahir, *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri* Jurnal Diskursus Islam Volume 05 Nomor 2, Agustus 2017

nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berasaskan pengayoman, dimana peraraturan yang dibuat harus berfungsi memberi jaminan perlindungan guna menciptakan ketentraman di masyarakat.⁸⁴

Hisam Affanah dalam *Fatawi Yasalunaka* menyebutkan bahwa pernikahan siri sangat berisiko sebab dapat menyebabkan pengabaian hak-hak dalam perkawinan. Pencatatan merupakan tindakan preventif karena dapat menjamin pemenuhan hak. Jika terjadi hal-hal negatif dalam keluarga, pencatatan perkawinan itu bisa menjadi bukti akurat guna menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Meskipun nikah siri itu sah, namun secara syarak melakukannya berdosa karena membuka ruang madlarat. Baik kepada suami, istri dan anak. Mengingat setiap muslim harus patuh dan tunduk kepada peraturan pemimpin selama itu baik dan juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat membahayakan.⁸⁵ Artinya perempuan yang dinikah siri poligami sarat akan bayang-bayang madlarat yang mengintainya. Tentu saja setiap madlarat harus diberantas atau diselaikan. Hanya saja penyelesaian dengan isbat nikah justru malah dibuntu oleh SEMA nomor 3 tahun 2018. Bahkan SEMA tidak memberikan solusi alternatif atas nasib perempuan. Setidaknya jika pintu isbat nikah tersebut bisa ditempuh, perempuan masih mempunyai asa untuk meraih yang maslahat baginya.

Catatan penting pembahasan ini adalah bahwa perempuan bersedia berpoligami pada dasarnya dilandasi keterpaksaan. Andai ada pilihan yang lebih

⁸⁴ Majalah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi Vol 33 Edisi 2009 H. 3

⁸⁵ Hissam Affanah, *Fatawi Yasalunaka*, Maktabah Dandis, Palestina, 1430 H. Juz 10 H. 445

baik, niscaya mereka dapat mengambil pilihan tersebut.⁸⁶ Problem terbesar perempuan poligami siri terletak dalam jeratan hukum agama dan kesulitan mengakses hukum Negara. Perempuan dituntut melakukan kewajibannya sebagai istri namun disatu sisi Negara tidak mengakui statusnya sebagai istri sebelum diproses sesuai prosedur. Artinya hukum agama dan hukum Negara tidak berjalan beriringan yang menyebabkan munculnya kontradiksi hukum. Sayangnya jalan prosedural guna menetapkan poligami siri tidak bisa dilakukan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018. Dalam posisi demikian, perempuan dalam posisi yang dirugikan. Mengingat sebagai istri perempuan juga memiliki hak-hak atas suaminya dan hak sebagai warga Negara.

Maslahat pada prinsipnya merupakan sebuah makna atau media yang berfungsi mengunduh sebuah hal yang manfaat dan menghindarkan dari yang madlarat.⁸⁷ Isbat nikah pada hakikatnya merupakan media guna menjamin kemaslahatan hak-hak suami istri dan anaknya. Kemaslahatan ini menyangkut persoalan *hifdzun nafs* seperti keberlangsungan hidup, *hifdzul mal* seperti kepastian mendapatkan hak-hak materi seperti waris dan *hifdzul nasl* seperti menjamin nasab dari anak yang lahir. Dengan demikian isbat nikah sendiri pada dasarnya adalah sebuah kemaslahatan. Sayangnya retorika terbalik justru terjadi ketika isbat nikah ditutup. Itu artinya SEMA seolah mematikan maslahat bagi perempuan. Maslahat menjadi tidak bisa diakses.

⁸⁶ Agus Hermanto, *Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam Vol 1 Juni 2015 H. 166

⁸⁷ Ghazali, *al-Mustasfa* Juz 173

Dari pemaparan panjang di atas, setidaknya ada dua alternatif terkait problematika perempuan poligami siri. Pertama pintu isbat nikah dibuka sepenuhnya, mengingat dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pembukaan permohonan isbat nikah dapat diminimalisir sebagaimana uraian di atas. Yang pada intinya madlarat pembukaan isbat nikah dapat terminimalisir dengan kecermatan dan kehati-hatian hakim. Menimbang tidak semua perkara isbat nikah yang bisa diproses disimpulkan bisa diputus sah secara hukum. Artinya kebolehan pengajuan isbat poligami tidak ditafsirkan secara otomatis bahwa poligami siri itu disahkan. Pintu isbat tetap dibuka dan proses pemeriksaan secara cermat dan akurat oleh hakim tetap dikedepankan guna menjatuhkan putusan yang adil.

Ke dua adalah membaca larangan isbat nikah pada SEMA nomor 3 tahun 2018 berlaku secara global atau komunal namun tidak berlaku secara kasuistik atau individual. Artinya isbat nikah poligami masih memiliki peluang untuk diproses ke tahap berikutnya dengan pertimbangan hakim setelah membaca riwayat permohonan perkara isbat poligami. Jika dirasa perlu dilanjutkan berdasarkan atas kemaslahatan dan kepentingan para pihak terkait, hakim bisa melanjutkan persidangan. Namun jika dirasa tidak substantif dan cenderung mengelabui hukum, maka hakim bisa memberi putusan NO. Artinya hakim perlu membaca terlebih dahulu riwayat perkara isbat. Setelah itu hakim bisa memutuskan apakah perkara itu bisa disidangkan atau tidak.

Kedudukan SEMA nomor 3 tahun 2018 yang menetapkan pelarangan isbat nikah poligami dengan alasan khawatir terjadinya rekayasa hukum perlu dikaji ulang. Sebab maslahat berupa menghindarkan terjadinya rekayasa hukum masih

bersifat kekhawatiran yang masuk kategori asumptif. Disebut asumptif sebab tidak lantas dengan dibukanya pintu isbat nikah poligami, pasangan suami istri secara otomatis disahkan oleh pengadilan. Masih terdapat proses dan tahapan pemeriksaan berikutnya melalui meja hakim. Peluang diloloskannya isbat nikah poligami harus berdasarkan pertimbangan matang dari para hakim yang menangani perkara bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan fakta bahwa mudlarat atas perempuan poligami siri bersifat pasti dan mengintai perempuan. Khususnya jika terjadi pengabaian hak oleh pihak suaminya. Sedang kemaslahatan penutupan isbat nikah poligami oleh SEMA nomor 3 tahun 2018 hanya bersifat asumptif. Kongklusi dari mempertemukan kedudukan maslahat perempuan dan SEMA nomor 3 tahun 2018 menunjukkan bahwa kepentingan perempuan harusnya lebih diutamakan daripada kemaslahatan pelarangan isbat poligami. Mengingat madlarat perempuan bersifat nyata sedang penutupan isbat nikah hanya bersifat asumsi yang realitanya bisa saja tidak terjadi.

Untuk itu, berdasarkan pembacaan panjang terkait koherensi maslahat mursalah di sini peneliti cenderung lebih memilih bahwa penutupan isbat nikah poligami oleh SEMA Nomor 3 tahun 2018 harus dikaji ulang terkait relevansi dan kesesuaian atas prinsip kemaslahatan. Pelarangan SEMA Nomor 3 tahun 2018 bukan berarti bahwa pernikahan poligami siri dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah. Sebab konteks SEMA tersebut hanya berbicara terkait kewenangan hakim. Secara tidak langsung SEMA mengakui bahwa pernikahan poligami siri sah secara agama sehingga anak yang dihasilkan dapat diajukan asal-usulnya. Hanya saja

menyangkut persoalan kemaslahatan perempuan, SEMA tidak membaca lebih jauh terkait maslahat yang dikandung. Pada akhirnya peraturan itu sendiri justru blunder berakibat memberi dampak negatif kepada perempuan. Jika Mahkamah Agung memiliki dasar sesuai nafas islam, mestinya lebih menggunakan kaidah ‘segala kemudlatan harus dihilangkan’ serta menyesuaikan dengan kaidah ‘menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengambil dampak positif’.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Problematika poligami siri sangat berpotensi menyebabkan dampak negatif meliputi berbagai macam aspek. Pertama secara aspek hukum positif perempuan poligami siri tidak mendapatkan payung hukum dan bahkan tidak bisa mengesahkan pernikahan poligaminya tersebut. Ke dua perempuan tidak mendapatkan akses haknya sebagai warga Negara guna mendapatkan legalitas dokumen kependudukan yang sah. Ke tiga perempuan tidak bisa menuntut haknya sebagai istri meliputi hak nafkah, hak waris dan hak perlakuan adil. Ke empat perempuan tidak bisa menghapus statusnya sebagai ‘istri’ mengingat yang dapat menghapusnya adalah suami atau hakim. Ke lima perempuan poligami siri menjadi konsumsi publik dan menerima sederet stigma negatif sehingga secara verbal harga dirinya telah dijatuhkan. Ke enam secara hubungan rumah tangga, kehadiran istri poligami siri dianggap sebagai perempuan simpanan yang kerap diacuhkan dalam berbagai persoalan.

Isbat nikah poligami ditinjau dari sisi maslahat mursalah sangat perlu diakomodir. Mengingat posisi kemaslahatan poligami siri levelnya adalah *hajiyyat* (sekunder) bahkan mencakup *dlaruriyat* (primer). Kemaslahatan isbat poligami adalah sebuah fakta sedang penutupan isbat nikah poligami hanya bersifat asumsi. Di samping itu, tidak semua kasus isbat nikah poligami harus disahkan. Hakim masih memiliki wewenang untuk memilah dan memutuskan mana yang maslahat.

Solusinya, Pertama isbat nikah dibuka seutuhnya atau ke dua hakim berlaku ketat dalam isbat nikah dimana apabila permohonan tersebut sangat bermanfaat bagi para pihak maka permohonan itu diproses, sedang apabila tidak substantif bisa dijatuhkan putusan NO.

B. Saran

1. Bagi para wali hendaknya tidak memberikan izin pernikahan kepada anaknya untuk dipoligami kecuali atas alasan yang mendesak dan dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
2. Bagi para pemangku kebijakan hendaknya. Khususnya Mahkamah Agung hendaknya perlu mengkaji ulang terkait penutupan isbat nikah poligami dalam Sema tahun 2018, mengingat perempuan yang sudah terlanjur poligami juga perlu diakomodir hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA:

A. BUKU ATAU KITAB:

- Abu Bakar Syatta, *Ianatul Talibin* (Darul Fikir, Beirut) Juz 4 h. 139
- Abu Zahrah, *Ilmu Usul Fikih*, (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2000)
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat nikah*, (Humanities Jenius, Makkasar, 2020) h. 21
- Amir Nurruddin dan Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana
- Amudi, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2003)
- As-subki, *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnul Hajib*, (Darul Fikr, Beirut, 2004)
- Samiah Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiquha Fi Fiqhil Islam* (Jam'iah Batinah, Aljazair)
- Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat*. Cet VI Edisi Revisi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 170
- Faizah Bafadhal, *Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi Maret 2014
- Ghazali, *al-Mustasfa* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2009)
- Humaidi al-Ubadi, *As-Syatibi Wa Maqasidus Syariat* (Darul Fikr, Beirut)
- Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqi'in*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, Darul Kutub Ilmah juz 10
- Izzudin bin Abdissalam, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisaril Maqasid*, (Darul Kutub Ilmiah, Beirut 2004)
- Jamal, *Hasyiah al-Jamal* (Darul Fikr, Beirut) juz 7 h. 281

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016)

Mardalis, *Metode Penelitian dan Pendekatan Proposal* (Jakarta, Bina Aksara, 2008)

Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008)

Muhammad Ahmad Burkab, *Maslahat Mursalah Wa Atsaruha Fi Fikhi al-Islami*, (Dar Ihya' Turats, 2002)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)

Raisuni, *Nadzariyatul Maqasid Inda Imam As-Syatibi*, (Dar Syuruq)

Riyandi S, *Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk berpoligami*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol 15. No. 1 Agustus 2015

Said Ramadlan al-Buti, *Dlawabitul Maslahah* (Muassasatur Risalah)

Salahudduin Muhammad Qasim, *Atsarul Maslahah fi siyasah as-Syar'iyah*

Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 2007)

Syairazi, *Al-Muhadzab* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2002) Juz 2 H. 126

Syirbini, *Mughni Muhtaj* (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2008) Juz 4. H. 148

Tahir bin Asyur, *Maqasid Syariah* (Muassasah Tunis, Tunisia)

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Wizaratul Auqaf Kuwait, *Musuah al-Islamiah al-Kuwaitiah* (Dar Salasil, Kuwait) juz 13. H. 172 M.

Yusuf al-Qardlawi, *Fiqhu Zakat*, Darul Fikr, Beirut

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Zakaria al-Anshari, *Asnal Mathalib*, (Darul Kutub al-Islami, 2008)

B. JURNAL:

Abdul Edo Munawar, *Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)* Jurnal Hukum islam, Vol. 17 Juni 2019

- Achmad Kholid Fauzi, *Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri*, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018
- Addin Daniar Syahdan, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019)
- Ade Darmawijaya, *Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat*, Jurnal Asy-Syariah Vol 21 Nomor 2 tahun 2019
- Agus Hermanto, *Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam Vol 1 Juni 2015
- Ahmad Cholid Fauzi Magister (Hukum Universitas Semarang), *Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri*, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018
- Arif Bijaksana, *Problematisasi Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 7 Maret 2019
- Asman, *Konsep Keadilan Dalam Poligami*, Jurnal al-Maslahah: Volume 15 Nomor 1 Juni 2019
- Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015
- Cik Basir, *Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama* (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018) Makalah disampaikan dalam Diskusi Hakim Peradilan Agama se Wilayah PTA Palembang di Aula PTA 26 April 2019
- Cucu Solihah, *Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019
- Djaenab, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Ash-Shahabah, Volume 4 Juli 2018
- Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017

- Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015
- Erniati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, MUSAWA, Vol. 7 No.2 Desember 2015
- Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Kartha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019
- Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi Maret 2014
- Farida Prihatin, *Dampak nikah siri terhadap istri dan anak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus FHUI hal. 3 Mahmudin Bunyamin, *Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern* Jurnal al-Daulah Vol. 3 No. 1 Juni 2014
- Fitria Oliva, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014
- H. Saubari, *Jerat Pidana Nikah Siri*, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/694/Jerat-Pidana-Nikah-Siri> diakses pada tanggal 12-03-2021
- Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum Adil Vol. 8 No.
- Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
- M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Siri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal IUS Vol VI Nomor 1 April 2018
- Mohammad Roqib, *Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016
- Muhammad Yusuf Siregar, *Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 5 Maret nomor 1 2017

- Mukhtaruddin Bahrum: *Problematisasi Isbat Nikah Poligami Siri*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 2019
- Nurul Hikmah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam* Lentera: Journal of Gender and Children Studies Volume 2 Issue 1, July 2020
- Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri* Jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Prasetyo Ade Witoko, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2 Juli - Desember 2019
- Revia Aldia Putri, *Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)* Jurnal Indonesian Notary Vol. 2 nomor 4 tahun 2020
- Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Sawwa – Volume 7, Nomor 2, April 2012
- Syukri Fathudin, *Problematisasi Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1, April 2010: 1-22
- Yufni Faishol, *Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wīl Al-Tanzīl* International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din Vol 18 No 1 (2016)
- Yusriyah, *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*, Al-Hamra, Jurnal Studi Islam Volume 1, No. 1, Februari, 2020: 69-80
- Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, AN NISA'A, VOL. 8, NO. 1, JUNI 2013

C. WEBSITE:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/hasil-diskusi-hukum-pta-palembang-hakim-wajib-pahami-sema-nomor-3-tahun-2018-30-4> diakses pada tanggal 12-3-2021